



MINISTRY OF TRADE
REPUBLIC OF INDONESIA

RENCANA KERJA

BIRO PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SRG DAN PLK

2026

**BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI**



MINISTRY OF TRADE
REPUBLIC OF INDONESIA



www.bappebti.go.id



[@bappebti](https://www.instagram.com/bappebti)



[Bappebti Kementerian Perdagangan](https://www.facebook.com/Bappebti.Kementerian.Perdagangan)



[infobappebti](https://twitter.com/infobappebti)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Rencana Kinerja Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK), Bappebti Tahun Anggaran 2026 dapat selesai tepat pada waktunya.

Rencana Kinerja Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK), Bappebti Tahun Anggaran 2026 ini disusun sebagai bentuk komitmen Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK), untuk melaksanakan Program Kerja dalam Tahun Anggaran 2026. Agar Pelaksanaan Program Kerja dapat dinilai dan diukur dengan baik, maka perlu dibuat target-target pengukuran kinerja secara kuantitatif dan kualitatif, sehingga memudahkan untuk melakukan evaluasi kinerjanya. Dalam Rencana Kinerja Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan target-target untuk sasaran makro serta indikator kinerja untuk input, output, dan outcome yang diambil dalam FORM RENCANA KINERJA Bappebti Tahun Anggaran 2026.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) Tahun Anggaran 2026, semoga pelaksanaan Program Kerja Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) Tahun Anggaran 2026 berjalan sesuai dengan rencana dan tidak ada hambatan.

Akhir kata, semoga Rencana Kinerja Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK), Bappebti Tahun Anggaran 2026 ini dapat bermanfaat dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) pada khususnya dan Bappebti pada umumnya.

Jakarta, 23 Desember 2025

 **Plt. Kepala Biro Pembinaan dan
Pengembangan SRG dan PLK,** 



MATHEUS HENDRO PURNOMO

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	4
C. Ruang Lingkup	7
BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	9
A. Capaian Kinerja Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG & PLK Tahun 2024	9
B. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2023	65
BAB III RENCANA KERJA	67
A. Visi dan Misi	67
B. Program, Kegiatan, Tujuan, dan Sasaran Kegiatan,	68
C. Indikator Kinerja Kegiatan dan Output Kegiatan	69
BAB IV PENUTUP	90
LAMPIRAN	
Form Rencana Kerja	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Penyusunan Rencana Kerja Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas bertujuan untuk menjaga kesesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappebti.”

Prospek perekonomian Indonesia pada 2026 diperkirakan membaik dan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Prospek perekonomian yang membaik ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, inflasi yang terkendali, serta keseimbangan eksternal yang terjaga.

Di tengah berlanjutnya tantangan juga muncul berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas makroekonomi di tengah risiko inflasi yang meningkat terkait kenaikan harga pangan dan lesunya roda perekonomian global akibat pandemic yang tak kunjung usai. Dalam jangka menengah, masih terdapat beberapa tantangan struktural dari domestik yang dapat menghambat berlanjutnya pemulihan ekonomi. Tantangan tersebut berkaitan dengan penguatan daya saing perekonomian, penguatan kapasitas dan kapabilitas industri, penciptaan ekonomi yang inklusif, penyediaan sumber pembiayaan ekonomi yang berkesinambungan, dan perkembangan teknologi digital.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah menerapkan beberapa strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan di tahun 2026. Serta, mendorong pembiayaan yang efisien, efektif dan berkelanjutan. Adapun khusus untuk Kementerian Perdagangan, mengacu pada Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029, maka ditetapkan 3 Misi Kementerian yaitu:

1. Meningkatkan kinerja perdagangan domestik yang terintegrasi dan berkelanjutan pada periode 2025-2029;
2. Meningkatkan kinerja ekspor barang dan jasa yang bernilai tambah dan berkelanjutan pada periode 2025-2029; dan
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan urusan perdagangan yang efektif dan efisien pada periode 2025-2029.

Dari aspek perdagangan, terdapat beberapa ciri sistem perdagangan yang mampu mempertinggi daya saing. **Pertama**, sistem tuntutan perkembangan ekonomi. **Kedua**, sistem perdagangan yang efisien, ditandai dengan setiap tambahan biaya pemasaran disertai peningkatan nilai tambah produk yang lebih memuaskan konsumen dan memberi imbalan memadai bagi produsen. **Ketiga**, sistem perdagangan yang transparan dengan mekanisme pembentukan harga yang transparan/terbuka. **Keempat**, sistem perdagangan yang kompatibel dengan berbagai institusi (pasar) perdagangan yang berlaku di dunia, sekaligus mampu memanfaatkan berbagai instrumen perdagangan yang tersedia.

Dari keempat ciri tersebut, perdagangan komoditi khususnya komoditi pertanian, Indonesia masih menghadapi banyak permasalahan, diantaranya sistem perdagangan umumnya masih bersifat tradisional, belum terorganisasi secara baik, integrasi antar tingkatan masih lemah, kurang efisien, dan tidak peka terhadap tuntutan perkembangan usaha ataupun kondisi ekonomi. Kesemuanya ini berpotensi mengakibatkan lemahnya posisi rebut-tawar (*bargaining power*) petani-produsen, yang berimplikasi pada lemahnya daya saing produk, sehingga rendahnya perolehan harga serta rendahnya pendapatan.

Berbagai masalah yang dihadapi dalam sistem perdagangan tersebut, berkaitan dengan kondisi institusi (pasar) perdagangan yang belum berkembang sepesat perkembangan kegiatan perdagangan hasil industri pengolahan/manufaktur. Oleh karena itu, sudah selayaknyalah jika pengembangan pasar fisik yang terorganisir (Pasar Lelang Komoditas) dan Sistem Resi Gudang lebih dimasyarakatkan dan diimplementasikan sebagai alternatif solusi yang efektif dan efisien.

Dalam pemasaran, petani produsen seringkali tidak mempunyai informasi harga yang diperlukan sebagai referensi dalam menentukan harga jualnya. Di samping itu, dengan karakteristik komoditi pertanian yang sangat bergantung pada musim, harga komoditi pertanian sangat berfluktuasi yang tidak

menguntungkan, terutama bagi petani produsen, karena harga jatuh yang harus diterimanya pada saat panen, sementara harga tinggi pada masa barang langka dan tidak lagi dimilikinya. Di pihak lain harga yang berfluktuasi tersebut juga merupakan masalah bagi industri pengguna produk tersebut, karena tidak ada kepastian perolehan pasokan.

Menghadapi permasalahan tersebut, melalui pasar lelang tidak hanya untuk penyerahan segera, tetapi juga dapat untuk penyerahan dalam beberapa minggu bahkan bulan ke depan. Melalui pasar lelang, harga terjadi dilakukan secara transparan dan terbentuk berdasarkan mekanisme pasar sehingga harga tersebut dapat dijadikan acuan semua pihak. Harga yang ditetapkan untuk penyerahan beberapa minggu atau bulan ke depan merupakan kepastian harga yang akan diterima hasil panennya yang akan datang sehingga petani produsen lebih berkonsentrasi untuk peningkatan produksi baik secara kuantitas dan kualitas.

Selain itu, untuk mengatasi kebutuhan dana sementara hasil panen belum ada atau sengaja ditunda penjualannya menunggu harga terbaik dapat diatasi dengan menggunakan skema Sistem Resi Gudang. Melalui Sistem Resi Gudang, petani produsen dapat menyimpan hasil panennya dalam beberapa minggu atau bulan menunggu harga yang lebih baik. Untuk mendapatkan dana untuk kegiatan operasionalnya, Resi Gudang yang diterbitkan sebagai bukti penyimpanan komoditi dapat dijadikan agunan. Skema pendanaan melalui Sistem Resi Gudang telah digunakan sejak lama oleh negara-negara lain terutama di negara-negara maju. Skema Sistem Resi Gudang tersebut telah pula diimplementasikan oleh negara-negara berkembang, dan semakin dirasakan manfaatnya.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas TA. 2026 ini bertujuan untuk dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam menjalankan operasional sesuai dengan Tugas dan Fungsinya, sehingga diharapkan dapat tercipta program kerja dan kegiatan

yang terintegrasi dan bersinergi, baik dengan unit internal Bappebti maupun unit eksternal yang terkait.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas melaksanakan Kegiatan Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 06 Tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, tugas pokok dari Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan dan pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penguatan, pemberdayaan dan pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang komoditas;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan, pemberdayaan dan pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang komoditas;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penguatan dan pemberdayaan, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang komoditas;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang penguatan dan pemberdayaan dan pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang komoditas;
5. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan, pemberdayaan, dan pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang komoditas;
6. Penyiapan pelaksanaan pengembangan data dan sistem informasi di bidang pengembangan dan pembinaan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas;
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro

Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 313 dan Pasal 314 Peraturan menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, perlu menetapkan Tim Kerja pada Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pembagian Tugas Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pembinaan dan Pengembangan Fungsional di Lingkungan Biro Pembinaan dan pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas Tahun 2025 dengan penugasan sebagai berikut :

1. Ketua Tim Bidang Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas bertugas melakukan penyiapan bahan pengkajian dan analisa kebijakan yang digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi atau perumusan kebijakan di bidang Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, menyusun Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria pelaksanaan kebijakan di Bidang Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, melakukan analisis pengembangan kelembagaan dan produk di Bidang SRG dan PLK.
2. Ketua Tim Bidang Pemberdayaan Pasar Lelang Komoditas bertugas melaksanakan kebijakan di bidang Pemberdayaan Pelaku Pasar Lelang Komoditas sesuai dengan NSPL yang telah disusun, mengkoordinasikan kebijakan di bidang pemberdayaan pasar lelang komoditas dengan K/L, Pemerinta Daerah dan stakeholders terkaur, meningkatkan pemahaman Stakeholder dan pelaku usaha di bidang pasar lelang komoditas melalui bimbingan teknis maupun pertemuan teknis di bidang pasar lelang komoditas, menyiapkan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang pasar lelang komoditas dan melakukan identifikasi potensi atas wilayah komoditas dan kelembagaan pelaksanaan pasar lelang komoditas.

3. Ketua Tim Bidang Penguatan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas bertugas menyiapkan dan melaksanakan pemrosesan persetujuan di bidang PLK sesuai dengan NSPK yang berlaku, mereviu dan mengevaluasi NSPK di bidang pemrosesan dan persetujuan di bidang SRG dan PLK, serta menyiapkan dan monitor pelaksanaan pemeliharaan Sistem Informasi Persetujuan SRG dan Pasar Lelang Komoditas.
4. Ketua Tim Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pembiayaan Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) bertugas melaksanakan Kebijakan terkait Penyaluran Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) sesuai dengan peraturan yang berlaku, menyusun NSPK terkait Pelaksanaan Kebijakan Penyaluran SSRG, melakukan koordinasi dengan stakeholder penyaluran SSRG dalam rangka untuk memperoleh masukan atas pelaksanaan kebijakan terkait SSRG, melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi penyaluran SSRG serta melakukan pendampingan kasus SRG.
5. Ketua Tim Bidang Pemberdayaan Sistem Resi Gudang bertugas melaksanakan kebijakan di Bidang Pemberdayaan pelaku SRG sesuai dengan NSPK yang telah disusun, Meningkatkan pemahaman Stakeholders dan Pelaku Usaha di Bidang Sistem Resi Gudang melalui Bimbingan Teknis maupun Pertemuan Teknis di Bidang Pasar Lelang Komoditas, Menyiapkan dan Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Sistem Resi Gudang, dan Melakukan Identifikasi, Potensi atas Wilayah Komoditas dan Kelembagaan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang.

6. Ketua Tim Bidang Pengolahan Data dan Informasi SRG dan PLK bertugas Proses, Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Penyajian Data dan Informasi di Bidang Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, Menyiapkan dan Memonitor Pelaksanaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi WMS, penyajian data dan informasi di bidang SRG dan PLK, menyiapkan dan memonitor pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi Warehouse Management System (WMS), menyiapkan dan melakukan pelatihan penggunaan aplikasi WMS kepada stakeholder khususnya Pengelola Gudang SRG, melakukan koordinasi terkait pemanfaatan WMS dengan K/L dan stakeholder terkait lainnya, menyiapkan dan memonitoring pemeliharaan Sistem Pasar Lelang Terpadu (SPLT) dan menyiapkan dan memonitor pelaksanaan pemeliharaan Sistem Informasi Persetujuan SRG dan PLK.
7. Ketua Tim Bidang Tata Usaha bertugas Melakukan Urusan Perencanaan, keuangan, Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Barang Milik Negara, Persuratan, Kearsipan dan Kerumahtanggaan Biro.

C. Ruang Lingkup

***Ruang Lingkup
Penyusunan
Rencana Kerja
(Renja) Biro
Pembinaan dan
Pengembangan
Sistem Resi
Gudang dan Pasar
Lelang Komoditas
2026***

Rencana Kinerja Tahunan Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas mengacu pada Surat Keputusan Menteri Perdagangan RI. Nomor : 794/M-DAG/KEP/08/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementrian Perdagangan dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, serta ruang lingkup.

- Bab II. Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya yang memaparkan perkembangan dan hasil-hasil program kegiatan Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK pada tahun 2024
- Bab III. Rencana Kerja meliputi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Indikator Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK Tahun 2026
- Bab IV. Penutup

BAB II

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas Tahun 2024

Capaian target indikator kinerja utama (IKU) Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK pada Tahun 2024 seluruhnya diatas 107%

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, BAPPEBTI Kementerian Perdagangan RI telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas tersebut disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Bappebti tahun 2025-2029, Rencana Strategis Kementerian Perdagangan tahun 2025-2029, serta masukan *stakeholders* Pasar Lelang Komoditas dan Sistem Resi Gudang.

Sebelum terjadi perubahan Organisasi Tata Kerja Kementerian Perdagangan pada tahun 2022 sesuai Permendag Nomor 06 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan dimana terjadi perubahan nomenklatur biro yaitu yang semula Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas menjadi Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, pada periode tahun 2024 penilaian capaian kinerja Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas Tahun Anggaran 2024 mengacu pada sasaran strategis yaitu: Meningkatnya hasil pembinaan dan pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas.

Dari hasil pengukuran kinerja yang dilakukan, diperoleh gambaran bahwa kinerja Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi

Gudang dan Pasar Lelang Komoditas dalam tahun 2024 menunjukkan hasil yang baik terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan. Pada 2024 keseluruhan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah memenuhi target yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Tahun 2024 dan RENSTRA Bappebti 2025-2029. Untuk lebih detail mengenai gambaran capaian kinerja Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas dari Januari sampai dengan Desember 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Biro Pembinaan dan Pengawasan
Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2024 (Renstra/ Kontrak kinerja)	Capaian Tahun 2024	Prosentase Capaian (%)
1.	Pertumbuhan Jumlah Gudang SRG yang Dimanfaatkan untuk Implementasi Sistem Resi Gudang	15% (54 gudang)	50 gudang	92,6
2.	Pertumbuhan Jumlah Pengguna (Pelaku Usaha) dalam Pasar Lelang Komoditas	20% (2400 pelaku)	2.664 pelaku	111
3.	Persentase Pemahaman Bimbingan Teknis SRG dan PLK	90 %	91,67%	101,85
4.	Jumlah daerah yang telah memanfaatkan gudang SRG dengan Warehouse (WMS) Management System	27 Daerah	30 Daerah	111,11
5.	Indeks Kepuasan Layanan Perizinan SRG dan PLK	Nilai 85	Nilai 91,91	108,13
6.	Hasil analisis pengembangan kelembagaan dan produk Sistem Resi Gudang/Pasar Lelang yang direkomendasikan	4 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	125
7.	Persentase Pelaku Usaha yang Menjadikan Layanan Informasi Harga sebagai Referensi Harga Komoditas SRG dan PLK	85%	84,32	99,2

Pada Tahun 2024, untuk mencapai sasaran “Meningkatnya Hasil Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas”, Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas melaksanakan

kegiatan, yaitu:

IK 1 Pertumbuhan Jumlah Gudang SRG yang Dimanfaatkan untuk Implementasi Sistem Resi Gudang dengan kegiatan :

1. Pertemuan Teknis di Daerah dengan Pemangku Kepentingan;
2. Kegiatan Asistensi Implementasi Sistem Resi Gudang di Daerah;
3. Kegiatan monitoring tindak lanjut hasil pertemuan teknis;
4. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SRG;
5. Pemantauan Pelaksanaan Pembiayaan Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG);
6. Lembaga SSRG yang dipantau dalam pelaksanaan Pembiayaan Penyaluran Subsidi Sistem Resi Gudang
7. Pemrosesan Persetujuan Lembaga PLK

IK 2 Pertumbuhan Jumlah Pengguna (Pelaku Usaha) dalam Pasar Lelang Komoditas:

8. Pengelola Gudang SRG dan Pelaku Usaha Komoditi lainnya yang mengikuti temu bisnis penyelenggara PLK
9. Penyelenggara dan pelaku usaha PLK di daerah yang mengikuti pertemuan teknis
10. Penyelenggara dan Pelaku Usaha yang Mengikuti Asistensi dan Evaluasi Penggunaan SPLT
11. Sistem Pasar Lelang Terpadu yang handal

IK 3 Persentase Pemahaman Peserta Bimbingan Teknis di Bidang SRG dan PLK:

12. Pelaku Usaha dan Petani yang Mengikuti Bimbingan Teknis SRG dan PLK

IK 4 Jumlah Daerah yang telah Memanfaatkan Gudang SRG dengan Warehouse Management System (WMS)

13. Gudang SRG dengan Warehouse Management System

(WMS) yang dikembangkan

IK 5 Indeks Kepuasan Layanan Perizinan SRG dan PLK

14. Permohonan Persetujuan lembaga SRG

15. Pemeliharaan Sistem Informasi Persetujuan Lembaga SRG

IK6 Hasil Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Produk Sistem Resi Gudang/Pasar Lelang yang Direkomendasikan

16. Hasil analisa Pengembangan kelembagaan dan Produk di bidang SRG dan PLK

IK 7 Presentase Pelaku Usaha yang menjadikan Layanan Informasi Harga sebagai Referensi Harga Komoditas SRG dan PLK

17. Layanan Data Informasi harga di Bidang SRG dan PLK

Adapun capaian indikator kinerja oleh Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas tertuang dalam uraian sebagai berikut:

IK-1 Pertumbuhan Jumlah Gudang SRG yang Dimanfaatkan untuk Implementasi Sistem Resi Gudang

Pengembangan SRG secara nasional sudah menjadi komitmen Bappebti. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan jumlah Gudang SRG yang dimanfaatkan untuk Implementasi Sistem Resi Gudang. Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK menargetkan pertumbuhan jumlah Gudang SRG yang dimanfaatkan untuk Implementasi Sistem Resi Gudang sebesar 15%. Dalam menentukan target pertumbuhan Gudang, digunakan angka jumlah gudang yang telah menerbitkan resi gudang secara Year on Year (YoY) pada periode yang sama tahun 2023. Pada akhir tahun 2023 terdapat 47 Gudang yang telah mengimplementasikan SRG. Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK menargetkan kenaikan sebesar 15% pada implementasi resi gudang. Jumlah ini kemudian menjadi angka dasar (baseline) untuk menghitung target gudang yang mengimplementasikan SRG pada tahun 2024. Berdasarkan target

pertumbuhan sebesar 15% maka pada tahun 2024 harus ada penambahan sebanyak 7 gudang yang menerbitkan Resi Gudang sehingga target implementasi SRG saat ini adalah sebesar 54 gudang.

Tabel 2.2
Target dan Realisasi IK-1 Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
Pertumbuhan Jumlah Gudang yang dimanfaatkan untuk Implementasi SRG	15% (54 gudang)	13,88% (50 gudang)	92,6%

Berdasarkan data transaksi tahun 2024 terdapat 50 gudang yang menerbitkan Resi Gudang dengan nilai transaksi mencapai Rp 2,86 triliun dan nilai pembiayaan sebesar Rp1,89 triliun. Dilihat dari sisi capaian target, yaitu jumlah gudang yang dimanfaatkan untuk implementasi SRG adalah sebesar 15% atau 54 gudang, maka capaian kinerja (IK 1) tahun 2024 mencapai

92,6%. Namun demikian, jumlah gudang yang dimanfaatkan untuk implementasi SRG pada tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 (47 gudang). Untuk mendukung capaian IK-1 ini dilakukan kegiatan-kegiatan pendukung berupa asistensi Implementasi SRG, pertemuan teknis SRG, bimbingan teknis SRG kepada petani dan pelaku usaha dan bimbingan teknis penyiapan calon pengelola gudang SRG dan bimbingan teknis peningkatan kapasitas pelaku usaha dan lembaga SRG. Indikator Kinerja berupa Pertumbuhan Jumlah Gudang Yang Dimanfaatkan Untuk Implementasi SRG (IK-1) merupakan Indikator Kinerja perubahan dari tahun sebelumnya (2023), yaitu Jumlah Pengelola Gudang Yang Telah Menerbitkan Resi Gudang dengan capaian target sebesar 98%. Mengingat adanya perbedaan obyek yang dijadikan dasar sebagai perhitungan indikator, yaitu pengelola gudang (2023) dan gudang (2024), maka capaian target untuk indikator ini tidak dapat dibandingkan antara tahun 2023 dan 2024.

Adapun kegiatan pendukung untuk mencapai indikator Jumlah

Gudang yang dimanfaatkan untuk Implementasi SRG dilaksanakan kegiatan pendukung seperti :

1. Pertemuan Teknis SRG di Daerah dengan Pemangku Kepentingan diselenggarakan dengan tujuan untuk mengkoordinasikan program kerja dan kebijakan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam mendukung akselerasi pelaksanaan SRG. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini akan terdapat sinergi dan koordinasi antara instansi – instansi terkait dengan lembaga-lembaga serta stakeholder dalam SRG dalam mengimplementasikan kebijakan SRG di daerah. Target dari Pertemuan Teknis di Daerah dengan Pemangku Kepentingan adalah 7 kegiatan (3 dilakukan secara offline dan 4 secara online). Selama tahun 2024 telah dilaksanakan 9 (sembilan) kali Pertemuan Teknis yang melibatkan Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Lembaga PLK dan SRG, di 3 daerah yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Sumatera Barat dan Lampung, serta 3 (tiga) kali Pertemuan Teknis secara online yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, Pertemuan Teknis Komoditas Garam, dan Pertemuan Teknis Komoditas Tembakau. Selain itu, Dilakukan juga kegiatan monitoring tindak lanjut pertemuan teknis di 3 (tiga) daerah, yaitu: Tasikmalaya, Subang dan Kuningan. Kegiatan Pertemuan Teknis ini dilakukan untuk melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mendorong pelaksanaan SRG di daerah.



Gambar 3. 2 Pelaksanaan Pertemuan Teknis di Lampung

2. Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SRG dilakukan untuk memberikan penyegaran terhadap Pengelola Gudang SRG terkait ketentuan dan hal-hal teknis dalam pelaksanaan SRG di daerah. Selain Pengelola Gudang SRG, kegiatan ini juga diikuti oleh lembaga dan pelaku usaha lain yang berpotensi untuk menjadi Pengelola Gudang SRG. Pada tahun 2024 kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu di Bandung dan Tangerang dengan total peserta 78 lembaga.
3. Kegiatan Bimbingan Teknis juga dilakukan kepada Petani dan Pelaku Usaha Komoditas. Pada tahun 2024 kegiatan ini telah dilaksanakan di 7 (tujuh) daerah yaitu: Tasikmalaya, Subang, Probolinggo, Lampung Selatan, Bangka Belitung, Temanggung dan Kuningan dengan total melibatkan 416 peserta.
4. Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas juga dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan Calon Pengelola Gudang yang dilaksanakan secara daring. Pada tahun 2024 Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK menargetkan 5 (lima) lembaga yang mengikuti pelatihan

calon pengelola gudang SRG untuk menjadi pengelola gudang SRG. Pada realisasinya telah dilakukan 3 kali Bimbingan Teknis Penyiapan Calon Pengelola Gudang SRG dengan Peserta berasal dari 106 Lembaga. Dari 106 Lembaga tersebut, terdapat 5 lembaga diantaranya yang telah memperoleh persetujuan sebagai Pengelola Gudang SRG dan beberapa Lembaga lainnya masih berproses untuk melengkapi Dokumen Persetujuan sebagai Pengelola Gudang SRG.

5. Pemantauan Pelaksanaan Pembiayaan Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) dilakukan untuk memastikan bahwa penyaluran pembiayaan SSRG dilakukan secara tepat sasaran. SSRG merupakan salah satu program subsidi pemerintah untuk membantu meringankan beban bunga/margin dari kredit/pembiayaan terhadap Resi Gudang yang diagunkan ke bank. SSRG diberikan khusus kepada pemilik Resi Gudang yang merupakan petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi maupun UKM. Melalui SSRG, para peserta hanya dikenakan beban suku bunga/margin kredit/pembiayaan sebesar 6% dari nilai pembiayaan yang diberikan. Sisa beban bunga/margin merupakan subsidi suku bunga yang dibebankan dalam APBN Kementerian Keuangan RI. Oleh karena itu, penyaluran SSRG harus dilakukan secara tepat guna dan tepat sasaran serta dilakukan sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan pemantauan pelaksanaan pembiayaan SSRG sebanyak 3 (tiga) kali di daerah Takalar, Aceh Tengah, dan Bantul. Bank penyalur yang dikunjungi saat kegiatan ini antara lain Bank BRI, Bank BSI, dan Bank BJB. Kegiatan Pemantauan Penyaluran SSRG kepada Bank Penyalur untuk memperoleh informasi terkait potensi dan kendala-kendala yang ditemui baik oleh Penerima SSRG, Pengelola Gudang SRG, Bank Penyalur maupun Pemerintah Daerah.



Gambar 3. 1 Pemantauan Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang di Kab. Bantul



Gambar 3. 2 Pemantauan Pelaksanaan Pembiayaan Skema Subsidi SSRG di Aceh Tengah

6. Dalam mendorong jalannya penyaluran Skema Subsidi Resi Gudang, telah dilaksanakan juga kegiatan pembinaan Lembaga penyalur SSRG untuk mendorong optimalisasi pelaksanaan penyaluran pembiayaan SSRG, memberikan pemahaman terhadap mekanisme penyaluran subsidi sehingga lebih mudah, aman dan berdayaguna bagi para peserta penerima subsidi maupun bank penyalur pembiayaan SSRG. Kegiatan ini telah dilaksanakan 17 (tujuh belas) kali, di daerah Bogor sebanyak 2 (dua) kali, Wonogiri sebanyak 2 (dua) kali, Probolinggo sebanyak 2 (dua) kali, Barito Kuala, Kuningan, Banjarmasin, Tegal, Surabaya, Bandung, Pasuruan, Takengon, Cianjur, dan Malang. Bank penyalur yang dikunjungi dalam kegiatan ini adalah Bank Kalsel, Bank BJB, Bank Jateng, Bank BRI, Bank Jatim, Bank Aceh Syariah, dan Bank BSI.

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dalam

melaksanakan implementasi SRG yang menyebabkan target IK-1 walaupun sudah di atas 92% namun belum mencapai 100%, antara lain seperti :

- Belum beroperasinya beberapa Gudang SRG milik Pemda yang dibangun melalui program Kemendag di daerah dikarenakan tidak adanya Pengelola Gudang. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah daerah untuk dapat mencari Pengelola Gudang yang memenuhi persyaratan.
- Beberapa Gudang SRG yang operasional menjadi terhenti dikarenakan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama antara Pengelola Gudang dengan Pemda selaku pemilik gudang yang tidak diperpanjang kembali, hal ini disebabkan karena alasan teknis seperti perlunya perbaikan atas kondisi gudang, penyesuaian kebijakan daerah, berubahnya rencana bisnis Pengelola Gudang maupun pengenaan biaya sewa yang relatif tinggi.
- Pemahaman petani, kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan) dan stakeholder lainnya terkait SRG yang masih terbatas sehingga perlu terus ditingkatkan dan diperluas.
- Terdapatnya permasalahan terkait dengan penyaluran pembiayaan yang sempat terjadi outstanding, atau Pengelola Gudang baru yang belum memperoleh kepercayaan lembaga pembiayaan dan lembaga uji mutu yang jauh dari lokasi gudang.
- Belum beroperasinya Lembaga Jaminan Sistem Resi Gudang yang berfungsi untuk melindungi pemilik Resi Gudang dari wanprestasi Pengelola Gudang SRG terhadap Resi Gudang yang diterbitkannya.
- Tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk mengoptimalkan Resi Gudang yang diterbitkan adalah:

- Melakukan edukasi kepada petani, pelaku usaha dan pemda untuk dapat mengoptimalisasikan Gudang SRG yang ada di daerahnya serta pemanfaatan Skema Subsidi Resi Gudang dengan mekanisme yang baru (sesuai dengan PMK Nomor 187/PMK.05/2021 dan Permendag terkait);
- Melakukan pemrosesan permohonan persetujuan kelembagaan SRG guna mendorong percepatan implementasi SRG di daerah;
- Melakukan bimbingan teknis bagi Calon Pengelola Gudang SRG maupun penguatan kelembagaan SRG untuk memperluas jangkauan dan menambah jumlah gudang-gudang SRG;
- Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, perbankan/lembaga keuangan non-bank, serta pelaku usaha dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait dengan implementasi SRG di daerah;
- Melakukan upaya terobosan untuk memitigasi resiko wanprestasi Pengelola Gudang, sambil mendorong berfungsinya Lembaga Pelaksanan Penjaminan SRG dengan mengusulkan penyesuaian/penerbitan Peraturan Pemerintah terkait Lembaga Jaminan SRG.

IK 2. Pertumbuhan Jumlah Pengguna (Pelaku Usaha) dalam Pasar Lelang Komoditas

Pasar Lelang Komoditas berfungsi sebagai sarana pemasaran komoditi yang efisien dan berperan dalam pembentukan harga yang wajar, adil dan transparan. Keberadaan Pasar Lelang Komoditas dapat menjadi wadah untuk mempertemukan secara langsung pembeli dengan penjual dalam upaya memperpendek mata rantai perdagangan dengan harapan terwujudnya sistem perdagangan nasional yang efektif dan efisien.

Tabel 2.3
Target dan Realisasi IK-2 Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
Pertumbuhan Jumlah Pengguna (Pelaku Usaha) dalam Pasar Lelang Komoditas	20% 2.400 pelaku	22,2% 2.664 pelaku	111%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian IK Jumlah Pengguna Pasar Lelang yang Berpartisipasi tercapai sebesar 2.664 pengguna atau 111% dari target tahun 2023 yakni 2.400. Jika dilihat dalam 4 (empat) tahun terakhir yaitu persentase capaian IK-2 pada tahun 2020 sebesar 377% (realisasi 754 dan target 200), tahun 2021 sebesar 359,05% (realisasi 1.666 dan target 464), tahun 2022 sebesar 130,67% (realisasi 2.352 dan target 1.800), dan tahun 2023 sebesar 120,2% (realisasi 2.404 dan target 2.000) maka pada tahun 2024 ini mengalami peningkatan jumlah partisipasi Lelang yang cukup signifikan, tetapi jika dilihat dari sisi nilai transaksi maka pada tahun 2024 total nilai transaksi Lelang sebesar Rp. 97,15 Milyar meningkat 46,9% jika dibandingkan dengan nilai transaksi tahun 2023 sebesar 66,01 Milyar rupiah.

Tercapainya realisasi IK-2 karena pemahaman dikalangan pelaku usaha terkait instrumen PLK telah meluas sehingga meningkatkan partisipasi, frekuensi penyelenggaraan PLK meningkat dari tahun sebelumnya dan penyelenggaraan PLK (khususnya di daerah penerima dana dekon/TP) tidak hanya dilakukan di pusat kota Provinsi, namun juga dilakukan di beberapa daerah/kabupaten sentra penghasil komoditas sehingga turut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan partisipasi pelaku usaha dalam Pasar Lelang. Selain itu keterlibatan salah satu anak usaha BUMN (PT KPBN dan PT KBI) dalam Penyelenggaraan PLK juga turut mendorong peningkatan kinerja PLK baik dari aspek transaksi maupun partisipasi pelaku usaha. Perlu kami informasikan bahwa kegiatan dalam rangka mendukung tercapainya IK-2 ini merupakan

kegiatan Prioritas Nasional.

Frekuensi penyelenggaraan pasar lelang komoditas pada tahun 2024 tercatat sebanyak 87 kali yang tersebar di 13 daerah (provinsi).

No	Penyelenggara	Pasar Lelang ke-		Nilai Transaksi	Jenis Komoditi	Pelaku		Peserta
						penjual	pembeli	
1	Koperasi Apkarkusi Riau Riau	1	3 Januari 2024	214,889,322	Karet Bokar	9	4	13
		2	9 Januari 2024	166,168,340	Karet Bokar	10	4	14
		3	15 Januari 2024	260,523,114	Karet Bokar	12	4	16
		4	22 Januari 2024	317,205,000	Karet Bokar	10	4	14
		5	30 Januari 2024	257,915,350	Karet Bokar	11	4	15
		6	4 Februari 2024	430,379,776	Karet Bokar	13	4	17
		7	11 Februari 2024	308,115,090	Karet Bokar	12	5	17
		8	18 Februari 2024	212,714,880	Karet Bokar	10	5	15
		9	25 Februari 2024	534,895,920	Karet Bokar	12	5	17
		10	3 Maret 2024	366,650,900	Karet Bokar	12	5	17
		11	10 Maret 2024	580,902,400	Karet Bokar	13	6	19
		12	17 Maret 2024	700,560,300	Karet Bokar	13	6	19
		13	24 Maret 2024	910,026,650	Karet Bokar	13	5	18
		14	31 Maret 2024	935,469,300	Karet Bokar	13	5	18
		15	21 April 2024	494,865,333	Karet Bokar	13	6	19
		16	28 April 2024	402,657,165	Karet Bokar	13	7	20
		17	5 Mei 2024	611,062,425	Karet Bokar	11	7	18
		18	12 Mei 2024	358,656,000	Karet Bokar	11	7	18
		19	19 Mei 2024	690,009,286	Karet Bokar	12	6	18
		20	26 Mei 2024	567,770,872	Karet Bokar	13	8	21
		21	2 Juni 2024	497,978,600	Karet Bokar	13	8	21
		22	9 Juni 2024	527,800,300	Karet Bokar	13	9	22
		23	23 Juni 2024	666,662,700	Karet Bokar	13	8	21
		24	30 Juni 2024	552,667,500	Karet Bokar	13	6	19
		25	7 Juli 2024	411,373,800	Karet Bokar	13	5	18
		26	14 Juli 2024	539,896,200	Karet Bokar	13	6	19
		27	21 Juli 2024	473,494,550	Karet Bokar	13	6	19
		28	28 Juli 2024	591,190,400	Karet Bokar	13	6	19
		29	4 Agustus 2024	527,202,000	Karet Bokar	12	6	18
		30	11 Agustus		Karet Bokar	13	6	19

				3,879,881,000		34	28	62
3	Koperasi Wira Agri Aneka Jaya (Waanekaya) Jawa Tengah	1	17 Juli 2024	4,370,000	Biji Pala	26	13	39
		2	25 Juli 2024	1,954,950,000	Bawang Merah, Kopi, Teh Hijau, Gula	28	12	40
		3	8 Agustus 2024	124,340,000	Gabah, Beras	31	12	43
		4	14 Agustus 2024	1,044,000,000	Cengkeh, Rempah, Minyak Kelapa	35	11	46
		5	22 Agustus 2024	124,340,000		32	14	46
		6	5 September 2024	186,376,000		50	11	61
		7	12 September 2024	311,216,000		40	13	53
		8	19 September 2024	23,791,000		40	10	50
				3,773,383,000		282	96	378
4	PT. Grafika Jaya Sumbar/ Dinas Perindag Sumatera Barat	1	26 November 2024	529,872,500	Kopi, Beras	55	56	111
				529,872,500		55	56	111
5	Dinas Perindag Sulawesi Utara	1	25 Oktober 2024	108,100,000	kacang, gula aren , dodol	60	15	75
		2	31 Oktober 2024	107,100,000	cabe, gula aren, dodol	55	12	67
		3	6 November 2024	38,750,000	kentang, kopi, gula aren	59	8	67
		4	21 November 2024	40,000,000	kacang	34	12	46
				293,950,000		208	47	255
6	Dinas Perindag Sulawesi Tenggara	1	25 September 2024	5,411,000,000	Cengkeh, Kakao, Gula Merah	24	12	36
		2	16 Oktober 2024	726,575,000	Nilam, Kopra, Cengkeh, Vanili, Merica	21	13	34

		2	16 Oktober 2024	726,575,000	Nilam, Kopra, Cengkeh, Vanili, Merica	21	13	34
		3	24 Oktober 2024	1,674,400,000	Jahe, Minyak Nilam, Beras	24	17	41
				7,811,975,000		69	42	111
7	Dinas Perindag Aceh	1	22 Agustus 2024	108,900,000	Kopi, Kakao	19	17	36
		2	10 Oktober 2024	46,900,000	Kopi	25	18	43
		3	18 November 2024	159,600,000	Kopi, Kakao	22	21	43
				315,400,000		66	56	122
8	Dinas Perindag Jambi	1	5 September 2024	1,338,300,000	Kayu Manis, Tempe, Telur	40	10	50
		2	22 Oktober 2024	100,700,000	Tempe, telur ayam, kelapa bulat, pinang, beras, kopi	35	14	49
		3	5 November 2024	984,200,000	Kelapa bulat, Pinang, Beras	36	13	49
		4	12 Desember 2024	2,731,600,000	Cengkeh, Kayu Manis, Kakao, Kemiri	32	16	48
				1,338,300,000		143	53	196
9	Dinas Perdagangan NTB	1	20 Agustus 2024	52,800,000	Kopi	18	10	28
		2	19 September 2024	229,500,000	Jagung, Kopi	28	15	43
		3	16 Oktober 2024	191,000,000	Vanili, Kayu Manis	24	15	39
		4	20 November 2024	58,200,000	Jagung, Beras	25	13	38
				531,500,000		95	53	148
10	Dinas Perdagangan Lampung/ Koptan Serba Jadi Sukses Bersama	1	23 September 2024	5,695,000,000	Lada, Cabe	30	10	40
		2	16 Oktober 2024	2,400,280,000	Cangkang Sawit, Gula Semut	40	10	50
		3	8 November 2024	3,699,200,000	Beras, Gaplek, Lada	28	12	40

				11,794,480,000		98	32	130
11	Dinas Perdagangan Sumatera Utara	1	15 Oktober 2024	360,500,000	Bawang Merah, Jeruk, Tomat, Cabe	30	10	40
		2	23 Oktober 2024	60,290,000	Jagung, Cabe, Kentang, Tomat, Brokoli	23	20	43
		3	8 November 2024	224,550,000	Bawang Merah, Jagung, Gula	22	17	39
				645,340,000		75	47	122
12	Dinas Perdagangan Banten	1	21 November 2024	130,826,000	Cabe, Beras	24	16	40
				130,826,000		24	16	40
13	Koperasi Petani Lada Babel Bangka-Belitung			-		0	0	0
GRAND TOTAL				64,313,457,246		1807	857	2664

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai transaksi PLK pada tahun 2024 (yang berasal dari daerah penerima program Tugas Pembantuan PLK) T.A 2024) adalah sebesar Rp 64,313,457,246 atau menurun dari tahun sebelum yang tercatat senilai Rp. 66,012,814,769. Selain itu berdasarkan hasil penyelenggaraan PLK oleh PT KPBN, dimana pada tahun 2024 PT KPBN telah melakukan beberapa kali uji coba (*piloting*) penyelenggaraan PLK untuk komoditas Teh dan Karet, nilai transaksi tercatat mencapai Rp. 32,84 Milyar.

Target tercapai karena telah terlaksananya kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK kepada Pemerintah Daerah, Penyelenggara serta Pelaku Usaha terkait PLK. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IK Jumlah Pengguna Pasar Lelang yang Berpartisipasi antara lain melalui kegiatan seperti :

1. Kegiatan Asistensi dan Evaluasi PLK selama tahun 2024

Kegiatan asistensi dan evaluasi Penggunaan SPLT kepada Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dan Pelaku Usaha

bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada aparaturnya pemerintah daerah, stakeholders PLK dan pelaku usaha mengenai kebijakan Pasar Lelang Komoditas dan Sistem Pasar Lelang Terpadu sebagai sarana penunjang PLK yang berbasis teknologi informasi. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk pendampingan penggunaan SPLT kepada Tenaga Operator SPLT di daerah dan kepada pelaku usaha peserta lelang di daerah. Disamping itu kegiatan ini juga bertujuan untuk memperoleh feedback atau masukan dari para pengguna SPLT guna perbaikan dan peningkatan layanan SPLT sehingga kedepannya SPLT dapat menjadi sistem perdagangan komoditas yang *user friendly*. Selama Tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan Asistensi dan Evaluasi Penggunaan SPLT sebanyak 25 (dua puluh lima) kali di daerah Jawa Barat, Serang Banten, Makassar, Semarang, Solo, Pangkal Pinang, Manado Sulawesi Utara

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas tahun 2024 yang dilaksanakan, dapat diidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan PLK, antara lain:

- Pemanfaatan SPLT oleh penyelenggara pasar lelang yang belum maksimal, sehingga SPLT sebagai media/alat untuk memperluas jangkauan pasar kurang dirasakan manfaatnya oleh calon pembeli dan calon penjual pada pasar lelang;
- Tingkat partisipasi pelaku usaha dalam pasar lelang masih didominasi oleh peserta jual, sedangkan para penyelenggara lelang mengalami kesulitan dalam menarik minat pelaku usaha sebagai peserta beli potensial.
- Dukungan pemerintah daerah masih belum optimal di dalam mengembangkan PLK di daerah. Hal ini disebabkan masih lemahnya koordinasi dan sinergi antara organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di daerah pelaksanaan PLK;
- Tingkat literasi PLK di kalangan pelaku usaha di daerah masih belum merata dan perlu untuk ditingkatkan.

Tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas adalah

- Mendorong optimalisasi dana dekonsentrasi PLK sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan usaha di bidang PLK. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat menjalankan program pengembangan PLK dengan bersumber dari alokasi anggaran daerah (APBD), tidak hanya bergantung pada Dana Dekonsentrasi PLK.
- Optimalisasi Sistem Pasar Lelang Terpadu dalam penyelenggaraan lelang sehingga pelaksanaan lelang bisa dijalankan lebih efektif dan efisien, serta dapat memperluas cakupan pasar.
- Peningkatan literasi pelaku usaha hulu–hilir terhadap PLK dan SPLT sehingga akan meningkatkan partisipasi dalam Pasar Lelang.

Pada periode Agustus 2024 dilaksanakan monev hasil pertemuan teknis PLK di kota Pangkal Pinang, Provinsi Babel pada tanggal 7-8 Agustus 2024. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi implementasi PLK, khususnya untuk komoditas Lada, yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung sejak tahun 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dengan stakeholders setempat dalam mengupayakan kolaborasi pengembangan tata niaga Lada melalui Pasar Lelang Komoditas sekaligus melakukan identifikasi potensi dan kendala/tantangan dalam implementasi PLK Lada di Bangka Belitung. Kegiatan ini melibatkan Penyelenggara PLK (Koperasi Petani Lada Babel) dan para pelaku usaha budidaya lada dan ditindaklanjuti dengan pertemuan koordinasi yang melibatkan perwakilan Pemerintah Provinsi Babel (Sekretaris Daerah Provinsi Babel, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Dinas Perindag Provinsi Bangka Belitung, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan), perwakilan Dinas yang membidangi perdagangan dari

Kab./Kota di wilayah Provinsi Babel, PT BGR Logistics, PT Kliring Berjangka Indonesia, Koperasi Lada Babel (Pengelola Gudang SRG), Asosiasi serta para pelaku usaha Lada. Dalam kegiatan ini disampaikan bahwa Provinsi Bangka Belitung memiliki komoditas yang berpotensi besar, seperti lada, karet dan timah. Lada putih utamanya menjadi komoditas unggulan karena memiliki ciri khas yang tidak dimiliki komoditas lada putih dari daerah lain yang terletak pada tingginya kandungan peperin. Namun demikian, sistem perdagangan Lada di Provinsi Bangka Belitung masih belum berkembang dengan baik sehingga harga lada cukup fluktuatif yang menyebabkan tidak sebandingnya harga jual dengan biaya produksi. Selain itu, jaringan pemasaran Lada yang masih dikuasai oleh para pelaku usaha besar tertentu menyebabkan pembentukan harga Lada di tingkat petani tidak sepenuhnya merepresentasikan harga yang layak, cenderung berada di bawah harga pasar, serta tidak transparan. Oleh karena itu, Pemprov Babel mengharapkan instrumen Pasar Lelang dapat dioptimalkan menjadi salah satu alternatif dalam tata niaga Lada dalam mewujudkan perdagangan dan pemasaran Lada yang efektif, efisien, transparan dan berkeadilan. Bappebti menyampaikan bahwa implementasi PLK perlu dukungan semua pihak baik dari sisi pemerintah maupun para pelaku usaha. Berkaca dari kesuksesan pembentukan PLK dari daerah lain, dibutuhkan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan daerah serta dukungan dari para pelaku usaha terkait. Pemerintah Daerah juga perlu segera menyusun langkah – langkah strategis di dalam penyiapan PLK Lada, mulai dari peningkatan literasi PLK kepada para pelaku usaha dan petani, penetapan calon Penyelenggara Lelang, melakukan identifikasi dan pendekatan kepada para pelaku usaha baik di sisi hulu (produsen/petani) maupun hilir (pedagang/eksportir) untuk memanfaatkan PLK sebagai instrumen perdagangan serta jika diperlukan membuat regulasi daerah yang mendukung pengembangan PLK.

Selain itu, dengan sudah berjalannya Sistem Resi Gudang di Provinsi Babel, diharapkan akan dapat terbentuk model bisnis linkage SRG dan PLK (logistik, pembiayaan, pemasaran dan

perdagangan) untuk komoditas Lada, mulai dari tingkat produsen (petani) sampai dengan pedagang besar (eksportir);

2. Pelaksanaan Pertemuan Teknis Penyelenggara dengan Pelaku Usaha PLK diselenggarakan sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antar pihak yang terkait dalam penyelenggaraan dan pengembangan Pasar Lelang Komoditas, khususnya Dinas yang membidangi Perdagangan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas, Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Swasta dan Calon Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas yang telah dipersiapkan Dinas sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kinerja Pasar Lelang Komoditas pada tahun 2023 serta untuk melakukan koordinasi pengembangan Pasar Lelang Komoditas pada tahun 2024 sehingga diharapkan dapat menghasilkan rumusan strategis kebijakan Pasar Lelang Komoditas di daerah penerima dana Dekonsentrasi Pasar Lelang. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat teridentifikasi kendala - kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah di dalam mengembangkan PLK di daerah serta diperoleh masukan-masukan yang bersifat teknis dari para peserta kegiatan baik dari kalangan aparatur pemerintah daerah.

Pada 2024 telah dilaksanakan kegiatan Pertemuan Teknis Penyelenggara dengan Pelaku Usaha PLK sebanyak 4 (empat) kali antara lain:

- a) Kegiatan Pertemuan Teknis PLK Sulawesi Utara dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2024 bertempat di Hotel Mercure Manado, Minahasa dan dihadiri oleh Kepala Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Utara, Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulut dan Kabupaten/Kota di wilayah Sulut. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan literasi dalam rangka mendorong program Pembinaan Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) yang salah satunya melalui peningkatan literasi

pemangku kepentingan dan masyarakat di daerah. Kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Wakil Menteri Perdagangan RI.

- b) Pertemuan Teknis PLK di Bandung, Jawa Barat pada 28 Februari 2024 dilaksanakan di hotel Pullman Bandung. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bappebti, Sekretaris Bappebti, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK Bappebti, perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Direktur Pengembangan Bisnis dan Operasional PT Kliring Berjangka Indonesia beserta jajarannya, Direktur Utama PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara beserta jajarannya, perwakilan dari PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia (KPBI) serta perwakilan dari Koperasi Pasar Lelang Jawa Barat (KPLJB). Beberapa pokok pembahasan dan perkembangan diskusi yang disampaikan dalam kegiatan ini, antara lain Kepala Bappebti menyampaikan pentingnya penguatan kerjasama/kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta para stakeholders terkait dalam upaya pengembangan PLK secara nasional. Selain itu, menyikapi isu yang saat ini terjadi di Jawa Barat terkait perkembangan PLK yang diselenggarakan oleh KPLJB, Kepala Bappebti mendorong PT KPBN sebagai Penyelenggara PLK dengan skala perdagangan yang sudah relatif besar dan cakupan/jangkauan peserta lelang-nya sudah dalam skala nasional dapat menjalin kerjasama dengan Penyelenggara PLK lokal seperti KPLJB.

Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa catatan Implementasi PLK yang perlu untuk ditingkatkan/diperbaiki antara lain:

- Pelaksanaan lelang masih bergantung pada dana dekonsentrasi untuk itu percepatan revitalisasi di daerah perlu dilakukan agar tercipta penyelenggaraan lelang yang mandiri dan profesional
- Identifikasi peserta lelang oleh penyelenggara belum optimal dan partisipasi peserta lelang yang belum seimbang antara

peserta jual dan banyak beli (umumnya masih didominasi peserta jual)

- pelaksanaan lelang yang tidak berjalan secara terjadwal dan kontinu, sehingga pelaku usaha tidak mendapatkan kepastian suplai pada waktu yang dibutuhkan
- belum sepenuhnya menerapkan mekanisme penjaminan transaksi (hal ini disebabkan para peserta lelang masih awam dengan mekanisme penjaminan transaksi).

Dalam kegiatan ini, PT KBI sebagai Lembaga Penjaminan PLK membuka kerjasama dalam memberikan layanan penjaminan transaksi dalam PLK. Melalui skema penjaminan ini, diharapkan isu terkait gagal serah/bayar dalam penyelesaian transaksi PLK dapat teratasi dan dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha untuk memanfaatkan skema PLK dalam perdagangan komoditas.

Pada kegiatan ini dibahas skema kerja sama antara KPBN dan KPLJB yang diharapkan dapat menjadi model awal dalam program linkage PLK. Melalui skema linkage ini, diharapkan skala perdagangan komoditas (utamanya komoditas unggulan daerah) melalui PLK akan semakin meningkat. Adapun pola/mechanisme linkage ini perlu mengutamakan kepentingan bersama dalam menghasilkan pola kemitraan yang saling menguntungkan. Bappebti akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi PLK di daerah. Selain itu Bappebti akan mengawal progress kerjasama antara PT KPBN dengan KPLJB.



Gambar 3. 3 Pertemuan Teknis di Bandung, 28 Februari 2024



Gambar 3. 4 Pertemuan Teknis di Bandung 28 Februari 2024

- a) Pertemuan Teknis Pasar Lelang Komoditas di Bogor pada 10 Oktober 2024.

Kegiatan Pertemuan Teknis PLK di Kota Bogor dilaksanakan dalam rangka pengembangan Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas (PLK) melalui kajian yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan melakukan identifikasi factor apa saja yang berperan dalam Penyelenggaraan PLK serta upaya apa saja yang perlu dilakukan dalam mengoptimalkan Penyelenggaraan PLK bagi pelaku usaha di bidang komoditas. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dengan para pelaku usaha di bidang PLK dengan memaparkan hasil kajian Pengembangan Penyelenggaraan PLK dalam Upaya optimalisasi tata niaga komoditas melalui PLK.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2024 di Hotel Royal Padjajaran Kota Bogor dengan melibatkan beberapa pelaku usaha PLK dari Penyelenggara PLK Revitalisasi, Penyelenggara PLK Swasta, Dinas Perdagangan Provinsi, Lembaga Kliring serta perwakilan dari Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik Ditjen PDN, Direktorat Bahan Pokok dan Penting Ditjen PDN, Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Ditjen PDN, perwakilan dari Direktorat Logistik dan Pemasaran Ditjen PDSPKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian. Kajian terkait penataan dan pengembangan PLK khususnya membahas mengenai Model Bisnis PLK, yang disampaikan oleh Tim Ahli Prof. Lomy. Disampaikan bahwa latar belakang dari kajian ini adalah untuk mengidentifikasi hal - hal yang berpotensi membantu peningkatan kinerja PLK. Adapun hasil kajian yang disampaikan antara lain:

- a. Berdasarkan data transaksi 16 PLK yang diawasi Bappebti selama tiga tahun terakhir, diketahui bahwa nilai transaksi PLK secara rerata hanya 0.005% dari total PDRB Komoditas Agro di provinsi PLK berada. Jika dibandingkan dengan PDB Indonesia dari sector pertanian tahun 2022, yang sebesar Rp 2.428.900.500 juta (sumber: BPS), maka nilai porsi transaksi PLK baru meliputi 0.003% PDB Pertanian Nasional. Ini menunjukkan pemanfaatan pasar lelang komoditas yang masih relatif kecil. Untuk mengejar target 1% PDB Provinsi, dibutuhkan kenaikan transaksi 357 kali, sedangkan untuk mengejar target 1% PDB Nasional dibutuhkan kenaikan nilai transaksi 2.881 kali;
- b. Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang dapat mendukung peningkatan pemanfaatan PLK antara lain melalui peningkatan jumlah penyelenggara, menambah frekuensi lelang, meningkatkan jumlah transaksi, meningkatkan jumlah

peserta, dan lain lain. Adapun secara rerata, pelaksanaan lelang adalah sebesar 86 kali per tahun di 16 lokasi. Rata-rata nilai transaksi ini bervariasi antara Rp 0 juta hingga 46.8 Milyar per pelaksanaan karena tidak seluruh pelaksanaan lelang menghasilkan transaksi. Pada tahun 2023, rata rata nilai transaksi adalah 742 juta per pelaksanaan, meningkat 38% dari tahun 2022;

c. Setelah dilakukan identifikasi faktor-faktor dimaksud, maka perlu diketahui apakah ada model bisnis yang efektif untuk mendorong peningkatan transaksi PLK. Untuk itu, dipaparkan tujuan dari kajian ini yaitu untuk memberikan rekomendasi terkait:

- Model bisnis dan ekosistem pendukung dalam PLK sebagai dasar dalam Menyusun kebijakan penataan dan pembinaan/pengawasan PLK;
- Analisa terhadap insentif atas pemanfaatan PLK bagi para pelaku usaha, khususnya petani;
- Panduan/penetapan klasifikasi dan karakteristik komoditas yang ditransaksikan di PLK.

Dalam pelaksanaan kajian ini dilakukan survey yang dilakukan di dua tempat, yaitu di Koperasi Apkarkusi di Provinsi Riau dan Koperasi Waanekaya di Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan Lelang di Koperasi Apkarkursi dan Koperasi Waanekaya dilakukan secara online (dapat dipantau melalui SPLT). Harga di Koperasi Apkarkursi sudah mengacu pada harga internasional (harga bursa karet Singapura), sehingga mudah diterima semua pihak. Harga lelang ini cenderung lebih tinggi dibandingkan harga petani swadaya. Sementara itu, untuk komoditas agro di Koperasi Waanekaya belum memiliki harga acuan internasional, hal ini dapat memicu terjadinya kegagalan transaksi karena penetapan harga awal lebih tinggi daripada harga pasar.

Berdasarkan diskusi dengan penyelenggara Dinas pada kegiatan kunjungan lapangan, diperoleh informasi bahwa tantangan dalam penyelenggaraan PLK antara lain kesulitan mengumpulkan peserta,

kurang stok barang, kurang calon pembeli, waktu pelaksanaan lelang tidak sesuai waktu panen, adanya transaksi atau perjanjian di luar kegiatan lelang sehingga momen lelang hanya berupa temu dagang dan pada lelang berikutnya beberapa peserta tidak ikut lagi, jaringan internet daerah lambat sehingga sulit mengakses SPLT;

Untuk itu, beberapa faktor yang penting untuk dapat mendorong kegiatan lelang antara lain: adanya fasilitas pembiayaan, perantara perdagangan untuk menjangkau pasar yang luas, komoditi sebaiknya sudah memiliki acuan harga internasional, kemudahan dan harga logistic, integrasi SRG, perbaikan SPLT, sistem pajak yang jelas (di Koperasi Apkarkusi pajak dibebankan pada penyelenggara bukan petani), dan sertifikasi pemandu lelang.

- b) Pertemuan Teknis Pasar Lelang Komoditas di Makassar pada tanggal 14 November 2024.

Kegiatan Pertemuan Teknis Pasar Lelang Komoditas diselenggarakan pada tanggal 14 November 2024 di Hotel Whiz Prime Jalan Sultan Hasanuddin No. 4 Baru, Makassar. Dengan dihadiri oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perdagangan di Provinsi Sulawesi Selatan, Lembaga/Badan yang bergerak dalam Perdagangan serta para pelaku usaha yang berpotensi untuk menjadi Calon Penyelenggara Pasar Lelang dan bertransaksi jual/beli melalui Pasar Lelang Komoditas. Tujuan dari Pertemuan Teknis Penyelenggara dan Pelaku Usaha PLK Provinsi Sulawesi Selatan sebagai sarana koordinasi dan sinergitas program kerja serta kebijakan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam mendukung percepatan pengembangan PLK di Sulawesi Selatan. Serta penyusunan langkah kebijakan dan peran masing-masing pemangku kebijakan dalam mendukung PLK di daerahnya. Melalui pertemuan ini diharapkan akan didapatkan solusi dan rumusan rencana kebijakan di dalam mendorong serta mengembangkan implementasi PLK di Sulawesi Selatan. Tindak lanjut pada pertemuan ini adalah meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dengan Daerah tetap berjalan, khususnya dalam melakukan pemetaan pelaku

usaha dan komoditas unggulan yang potensial di daerah; Strategi kebijakan perdagangan komoditas unggulan di Sulawesi Selatan memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang saling mendukung. Dengan meningkatnya kualitas produk, perbaikan infrastruktur, perluasan akses pembiayaan dan memanfaatkan teknologi secara maksimal dapat meningkatkan daya saing komoditas unggulan di pasar domestik maupu internasional serta dengan menerapkan strategi kebijakan yang tepat akan membawa dampak yang positif terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan petani serta pelaku usaha; dan dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 membuka ruang bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan pengembangan PLK di daerah yang sinergis dengan dengan Pemerintah Pusat dan menyusun APBD untuk mendukung implementasi PLK.



Gambar 3. 5 Pertemuan Teknis Pasar Lelang Komoditas di Makassar 14 November 2024

IK-3 Persentase Pemahaman Peserta Bimbingan Teknis di Bidang SRG dan PLK

Guna meningkatkan pemahaman bagi Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dan Pengelola Gudang SRG, Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK memberikan bimbingan teknis tentang SRG dan PLK yang bertujuan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) Calon Pengelola Gudang yang handal dan profesional di daerah serta memahami prosedur dan proses dalam transaksi Resi Gudang serta penyelenggara lelang dapat menyelenggarakan lelang secara profesional dan mandiri untuk di

terapkan di daerah masing-masing. Guna mengukur tingkat pemahaman peserta mengenai SRG & PLK, kami telah memberikan kuesoiner tentang SRG & PLK.

Tabel 2.4

Target dan Realisasi IK-3 Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Pemahaman Peserta Bimbingan Teknis di bidang SRG dan PLK	90%	91,67%	101,85%

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata persentase pemahaman peserta pelatihan adalah sebesar 91,67% atau 101,85% dari target 2024 sebesar 90%. Hasil tersebut diperoleh berdasarkan pengukuran menggunakan kuesioner pada peserta pelatihan. Jika dilihat dalam 4 (tahun) terakhir yaitu capaian pada tahun 2020 (sebesar 105%), tahun 2021 (sebesar 112%), tahun 2022 (sebesar 105%), dan tahun 2023 (sebesar 104,35%) maka capaian pada tahun 2024 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan terdapat peningkatan target di tahun 2023 sedangkan realisasi pemahaman peserta pelatihan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kurang optimalnya capaian target IK-3 dapat disebabkan oleh metode pelaksanaan, jumlah peserta dan karakteristik peserta. Pada kegiatan bimbingan teknis penyiapan calon pengelola gudang SRG, kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui media *zoom* dengan jumlah peserta yang sangat banyak, sehingga efektifitas pelaksanaan kegiatan kurang maksimal. Banyaknya jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini disebabkan oleh tingginya animo pelaku usaha yang berminat untuk menjadi pengelola gudang SRG dan ingin memperoleh pengetahuan/kompetensi terkait pengelolaan gudang dalam skema SRG.

Selain itu, Bappebti juga menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis SRG kepada petani dan pelaku usaha di daerah yang diikuti

oleh petani dan pelaku usaha setempat. Pada umumnya tingkat pengetahuan peserta sangat terbatas dan kemampuan untuk mencerna materi ataupun soal kuisisioner cukup sulit. Hal ini menyebabkan pengukuran tingkat pemahaman melalui metode kuisisioner juga sulit diterapkan dan perlu dilakukan evaluasi.

Untuk itu, ke depan akan dilakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, antara lain:

1. Melakukan identifikasi dan verifikasi peserta bimtek penyiapan calon pengelola gudang SRG secara selektif. Penentuan peserta dapat dilakukan berdasarkan kepemilikan dokumen persyaratan sebagai Pengelola Gudang SRG sebagian besar telah terpenuhi;
2. Mengonsep ulang metode pelaksanaan bimtek bimbingan teknis secara *online* dengan melakukan pengaturan jadwal yang tidak terpusat pada satu waktu;
3. Bekerja sama dengan pengelola gudang SRG atau pemerintah daerah untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada petani dan pelaku usaha setempat secara berkelanjutan dengan pendekatan yang berbeda.

Target IK-3 pada tahun 2024 telah tercapai dengan terlaksananya kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan oleh Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK dalam rangka memberikan pemahaman kepada Pengelola Gudang, Pelaku Usaha, dan Petani. Sepanjang tahun 2024 kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan total jumlah peserta sebanyak 416 orang atau 113,54% melebihi target yang ditetapkan, yaitu sebanyak 360 orang. Realisasi IK-3 yang melebihi dari target yang ditetapkan karena adanya kerja sama dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis SRG serta tingginya minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan ini.

Adapun rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

No	Tanggal Pelaksanaan	Pelaksanaan Kegiatan	Rincian Kegiatan
1	7 Maret 2024	Offline	Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Aston Inn Kota Tasikmalaya bekerja sama dengan PT Kliring Berjangka Indonesia, Dinas KUKM Perindag Kota Tasikmalaya, PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (Persero) dan HIPMI Tasikmalaya, serta dihadiri oleh 60 orang petani dan pelaku usaha dari Kabupaten/Kota Tasikmalaya. Melalui kegiatan ini, para petani dan pelaku usaha yang hadir dapat memahami peran penting SRG dalam mendukung perekonomian masyarakat dan berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui sektor pertanian. Selanjutnya, pemerintah daerah akan segera memastikan keberlanjutan PT. Hanania Pasundan sebagai calon Pengelola Gudang SRG dan/atau mencari calon Pengelola Gudang SRG baru untuk mengoperasikan Gudang SRG Kab. Tasikmalaya.
2	28 Mei 2024	Offline	Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Wonorejo Kec. Maron Kab. Probolinggo Prov. Jawa Timur. Kegiatan ini

			dihadiri oleh Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perdagin Kab. Probolinggo, PT. BPD Jawa Barat Dan Banten Cabang Surabaya, Kepala Desa Wonorejo, PT. Cipta Usaha Agro Niaga (Pengelola Gudang SRG) dan 60 petani serta pelaku usaha di desa Wonorejo dan sekitarnya. Implementasi SRG di Kabupaten Probolinggo sudah berjalan dengan baik. Untuk memperluas pelaksanaan SRG, Pengelola Gudang akan mengembangkan SRG di daerah potensial, seperti Desa Wonorejo. Berdasarkan hasil kegiatan ini, para petani dan pelaku usaha tertarik untuk berpartisipasi memanfaatkan SRG. Untuk itu, Pengelola Gudang bersama aparat Desa akan segera menindaklanjuti hasil pertemuan ini dengan melakukan pertemuan lanjutan secara intensif yang melibatkan kelompok-kelompok tani.
3	11 Juni 2024 & 12 Juni 2024	Offline	Kegiatan ini diselenggarakan bekerja sama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan di Balai Desa Palas Jaya Kec. Palas (11 Juni 2024) dan Balai Desa Bandar Rejo Kec. Natar

			(12 Juni 2024). Secara umum, peserta kegiatan telah memahami manfaat SRG dalam mendukung kegiatan produksi dan pemasaran. Untuk itu, berdasarkan hasil kegiatan ini Pemerintah akan mendorong implementasi SRG di Desa Palas Jaya dengan mengoptimalkan gudang-gudang swasta. Selain itu, Pemkab bersama Bappebti juga akan melakukan percepatan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan gudang SRG oleh Koperasi Pertanian Serbajadi Sukses Bersama untuk memfasilitasi kebutuhan petani dan pelaku usaha.
4	8 Agustus 2024	Offline	Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Namang Kec. Namang Kab. Namang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan dihadiri oleh Kepala Bappebti, Sekretaris Bappebti, Kepala Dinas Perindag Provinsi Bangka Belitung, perwakilan dari Bank BRI Cabang Sngai Liat, Penyuluh Pertanian Provinsi, Sekretaris Desa, dan Ketua Koperasi Petani Lada Bangka Belitung selaku Pengeloal Gudang SRG, serta para petani dan pelaku usaha lada setempat.

			Pada dasarnya masyarakat setempat sudah memahami peran penting dan manfaat SRG. Namun, kebutuhan petani untuk melakukan penyimpanan lada saat ini lebih diperuntukan untuk mendukung mekanisme tunda jual saja tanpa dicairkan pembiayaannya. Untuk itu, guna mendorong pelaksanaan SRG Lada ke depan, pemerintah mendorong pengelola gudang SRG untuk lebih aktif lagi dalam melakukan sosialisasi dan edukasi serta melakukan pendekatan dan kerja sama dengan para pelaku usaha.
5	14 Agustus 2024	Offline	Kegiatan ini dilaksanakan di Gudang SRG Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah di Desa Cisalak Kec. Cisalak Kab. Subang. Kegiatan dihadiri oleh Perwakilan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Subang, PT. Kliring Berjangka Indonesia, dan petani serta pelaku usaha kopi di Kab. Subang. Kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait manfaat penting SRG dalam meningkatkan kesejahteraan

			petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga dalam rangka mendukung penguatan ekspor komoditas kopi yang dikelola oleh Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah dengan mekanisme SRG. Secara umum, peserta memahami dan antusias untuk meningkatkan partisipasinya dalam pelaksanaan SRG komoditas kopi di Subang. Ke depan, Pengelola Gudang SRG bersama Pemkab dan para petan kopi akan saling bersinergi dan koordinasi untuk meningkatkan produksi kopi subang dan mengoptimalkan pemanfaatan SRG di Kab. Subang.
6	8 Oktober 2024	Offline	Kegiatan ini dilaksanakan di Gudang SRG CV. PD Corporation di Kabupaten Temanggung. Gudang SRG CV. PD Corporation merupakan gudang SRG swasta untuk penyimpanan komoditas tembakau yang dikelola oleh PT. Selaras Pangan Sejahtera Indonesia (PT Spasi). Pertemuan ini diikuti oleh Perwakilan dari Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Temanggung, Bank BJB

			Cabang Surabaya, PT. Spasi, 76 orang petani dan pelaku usaha tembakau dan kopi di Kab. Temanggung. Berdasarkan hasil pertemuan ini, pemerintah daerah dan Bappebti akan melakukan koordinasi lebih intensif untuk melakukan pembinaan dan pengembangan SRG di Kabupaten Temanggung. Selain itu, PT Spasi juga akan melakukan pertemuan lanjutan dengan petani dan kelompok tani untuk menyiapkan pola kerja sama pemanfaatan SRG di Kabupaten Temanggung untuk komoditas tembakau dan kopi.
7	19 November 2024	offline	Kegiatan ini dilaksanakan di Saung Gunung Resto Desa Cibentang Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan dengan melibatkan 60 petani dan pelaku usaha di Kab. Kuningan. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kuningan, perwakilan Bank BJB dan Koperasi Tani Bangkit Sejahtera (Tabara) selaku Pengelola Gudang SRG di Kab. Kuningan. Secara umum, para petani dan pelaku usaha siap untuk memanfaatkan SRG. Untuk itu,

			berdasarkan hasil pertemuan ini, untuk mendorong pelaksanaan SRG di Kab. Kuningan, Pemerintah mendorong Pengelola Gudang SRG untuk lebih aktif “menjemput bola” dan terus melakukan terobosan agar masyarakat dapat memanfaatkan SRG secara efektif.
--	--	--	---





Gambar 3. 6 Bimbingan Teknis SRG kepada Pelaku Usaha dan Petani di daerah

IK-4 Jumlah Daerah yang telah Memanfaatkan Gudang SRG dengan *Warehouse Management System (WMS)*

Dalam rantai logistik, gudang merupakan infrastuktur penting untuk terciptanya supply chain dalam mewujudkan pengadaan dan penyaluran logistik secara nasional. Dalam rantai pasok gudang tidak hanya sebagai tempat penyediaan komoditi dan pembiayaan namun juga dapat membuka akses pasar dengan adanya dukungan ketersediaan informasi yang akurat terkait dengan komoditi yang disimpan di gudang. Pada tahun 2020 Bappebti telah membangun Sistem Informasi Manajemen Pergudangan/ Warehouse Management System (WMS) yang mengintegrasikan seluruh gudang – gudang SRG yang dibangun pemerintah baik yang telah dimanfaatkan dalam skema SRG maupun belum. Pembangunan aplikasi ini berdasarkan kebutuhan Pengelola Gudang sebagai pengguna pertama yang mengiput informasi terkait dengan komoditi yang disimpan di dalam gudang. Ketersedian informasi yang valid dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah selaku pengguna akhir untuk mendapatkan gambaran kondisi riil di lapangan sehingga pengambilan kebijakan dan keputusan akan tepat sasaran dan tepat guna.

Tabel 2.5

Target dan Realisasi IK-4 Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Daerah yang telah Memanfaatkan Gudang	27	30	111,11%

SRG dengan <i>Warehouse Management System</i> (WMS)	Daerah		
---	--------	--	--

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 sebanyak 30 daerah telah memanfaatkan Gudang SRG dengan WMS atau tercapai 111,11% dari target tahun 2024. Tercapainya IK yang melebihi target karena adanya potensi aktivitas pengelola gudang di beberapa daerah baru seperti di Bali, Tarakan Utara, Tarakan Barat, Kuningan, Bantul, Banyuwangi, Pati, Bangka Tengah, Majalengka, dan Subang. Apabila persentase capaian IK-4 tahun 2024 sebesar 111,11% (realisasi 30 daerah) dibandingkan dengan presentase 2023 sebesar 127,27% (realisasi 28 daerah) dibandingkan dengan persentase tahun 2020 sebesar 100% (realisasi 6 daerah), tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 dikarenakan realisasi pada tahun 2024 pemanfaatan WMS dilakukan di beberapa daerah yang sebelumnya pernah di laksanakan pada tahun 2023. Indikator Kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2019 dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru mulai tahun 2020. Apabila capaian IK-4 dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis (tahun 2024) yaitu sebesar 27 Daerah maka capaian jumlah daerah yang telah memanfaatkan Gudang SRG dengan WMS tahun 2022 terhadap target 2024 adalah sebesar 103,7%.

Target pada IK-4 pada tahun 2024 ini tercapai didukung dengan koordinasi yang baik antara Bappebti dengan Dinas daerah, Pengelola Gudang, serta pihak terkait lainnya dalam pemanfaatan WMS untuk mendukung jalannya implementasi SRG. Sebagai informasi, kegiatan pendukung dalam tercapainya IK-4 merupakan kegiatan Prioritas Nasional. Realisasi jumlah daerah yang memanfaatkan WMS merupakan realisasi akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Daftar daerah yang memanfaatkan WMS dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 2.6

Daerah yang Memanfaatkan *Warehouse Management System* (WMS)

Daerah yang Memanfaatkan WMS	
Provinsi	Kota
Jawa Tengah	Grobogan
	Kebumen
	Tegal
	Wonogiri
	Purworejo
Daerah Istimewa Yogyakarta	Bantul
Jawa Barat	Cianjur
	Bekasi
	Subang
	Karawang
Jawa Timur	Ngawi
	Probolinggo
	Malang
Banten	Tangerang
Sulawesi Selatan	Gowa
	Makassar
	Luwu Timur
Aceh	Aceh Tengah
Kepulauan Bangka Belitung	Bangka Tengah
Sumatera Selatan	Pagar Alam
Lampung	Lampung Selatan
Kalimantan Selatan	Barito Kuala

Kegiatan pendukung untuk mendukung tercapainya IK – 4 ini antara lain, sebagai berikut :

1. Pada bulan Januari 2024 terdapat 23 daerah telah memanfaatkan Gudang SRG dengan aplikasi WMS. Capaian kinerja ini terwujud berkat kerjasama dan sinergi semua pihak yang terlibat antara lain, pemelihara sistem PT. Akar Prima Nusantara yang telah menjaga stabilitas fungsi aplikasi agar

dapat beroperasi dengan baik tanpa kendala berarti, Pengelola Gudang SRG yang telah menggunakan aplikasi WMS secara berkelanjutan, dan Departemen Biosistem dan Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dalam perannya sebagai penyedia tenaga pendamping penggunaan aplikasi WMS yang ditempatkan di Gudang SRG untuk membantu proses transfer ilmu sehingga pengelola Gudang dapat mengoperasikan aplikasi WMS di Gudang yang mereka kelola.

2. Pada Triwulan III bulan Agustus 2024 terdapat 30 daerah telah memanfaatkan Gudang SRG dengan aplikasi WMS. Capaian kinerja ini terwujud berkat kerjasama dan sinergi semua pihak yang terlibat antara lain, pemelihara sistem PT. Akar Prima Nusantara yang telah menjaga stabilitas fungsi aplikasi agar dapat beroperasi dengan baik tanpa kendala berarti, Pengelola Gudang SRG yang telah menggunakan aplikasi WMS secara berkelanjutan, Departemen Teknik Pertanian dan Biositem, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dalam perannya sebagai penyedia tenaga pendamping penggunaan aplikasi WMS yang ditempatkan di Gudang SRG untuk membantu proses transfer ilmu sehingga pengelola Gudang dapat mengoperasikan aplikasi WMS di Gudang yang mereka kelola. Kedepannya daerah baru yang diusulkan sebagai daerah yang akan memanfaatkan WMS pada Gudang SRG antara lain:
 1. Tabanan, Bali dengan Pengelola Gudang PT Rahmat Bahari Indonesia
 2. Pati, Jawa Tengah dengan Pengelola Gudang KSU Sarana Hidup Sejahtera
 3. Banyuwangi, Jawa Timur dengan Pengelola Gudang PT Sang Hyang Seri
 4. Tarakan Utara, Kalimantan Utara dengan Pegelola Gudang PT Tarakan Fisherindo Sipatuo
 5. Tarakan Barat, Kalimantan Utara dengan Pengelola Gudang PT Bunga Laut Samudera Jaya

6. Kuningan, Jawa Barat dengan Pengelola Gudang Koperasi Tani Bangkit Sejahtera
 7. Majalengka, Jawa Barat dengan Pengelola Gudang Perumda Sindangkasih Multi Usaha
 8. Bandung, Jawa Barat dengan Pengelola Gudang Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah
3. Selama Tahun 2024, telah dilaksanakan kegiatan pendampingan pengoperasian sistem aplikasi WMS oleh tenaga pendamping. Kegiatan ini kami laksanakan dengan menerjunkan sejumlah tenaga pendamping dari FTP UGM dan Tim KKN DPKM UGM yang sudah mendapatkan pelatihan pengoperasian aplikasi WMS. Pendampingan ini kami lakukan guna memperkenalkan dan menjelaskan WMS dan cara pengoperasiannya kepada Pengelola Gudang SRG di beberapa daerah.

Adapun kegiatan pendampingan yang dillakukan oleh Tim KKN DPKM UGM dilaksanakan mulai tanggal 2 Juli s.d. 19 Agustus 2024 di beberapa daerah, sebagai berikut:

Tabel 2.7 Daerah Pendampingan Pengoperasian Aplikasi WMS – DPKM UGM

No	Daerah	Pengelola Gudang
1.	Tabanan, Bali	PT Rahmat Bahari Indonesia
2.	Bantul, D.I. Yogyakarta	KUD Tani Harjo
3.	Pati, Jawa Tengah	KSU Sarana Hidup Sejahtera
4.	Banyuwangi, Jawa Timur	PT Sang Hyang Seri
5.	Bangka, Kepulauan Babel	Koperasi Petani Lada Bangka Belitung



Gambar 3. 7 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Hasil Pendampingan oleh Tim KKN DPKM UGM

Sementara itu, proses pendampingan oleh mahasiswa FTP UGM dilakukan secara intensif selama 1 (satu) bulan atau 25 (dua puluh lima) hari kerja dari periode tanggal 22 Juli s.d 25 Agustus 2024 di beberapa daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.8 Daerah Pendampingan Pengoperasian Aplikasi WMS – FTP UGM

No	Daerah	Pengelola Gudang	Tanggal Pelaksanaan
1.	Tarakan, Kalimantan Utara	PT Tarakan Fisherindo Sipatuo	23 Juli s.d. 23 Agustus 2024
2.	Tarakan, Kalimantan Utara	PT Bunga Laut Samudera Jaya	23 Juli s.d. 23 Agustus 2024
3.	Kuningan, Jawa Barat	Koperasi Tani Bangkit Sejahtera	22 Juli s.d. 22 Agustus 2024
4.	Majalengka, Jawa Barat	Perumda Sindangkasih Multi Usaha	22 Juli s.d. 22 Agustus 2024
5.	Subang, Jawa Barat	Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah	26 Juli s.d. 26 Agustus 2024



Gambar 3. 8 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Hasil Pendampingan oleh Tim FTP UGM

Selama periode program pendampingan implementasi WMS kepada Pengelola Gudang, diperoleh beberapa masukan dan kendala dalam penggunaan WMS untuk kegiatan rutinitas operasional Gudang yang disampaikan oleh tenaga pendamping kepada tim Bappebti dan tim pemeliharaan system PT Akar Prima Nusantara (APN) selaku pihak ketiga untuk pemeliharaan aplikasi *Warehouse Management System* (WMS). Beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan atas masukan tenaga pendamping pada beberapa fitur aplikasi WMS antara lain:

- Penambahan fitur *export data* untuk proses barang masuk dan barang keluar; dengan menambahkan menu tombol *export data* pada tabel barang masuk dan barang keluar;
- Perbaikan algoritma perhitungan jumlah koli pada perhitungan kemasan barang yang menyebabkan error *divided by zero* yang menyebabkan kegagalan proses simpan barang;
- Perbaikan pada proses penghitungan kapasitas Gudang setelah proses update barang masuk dan barang keluar yang ditampilkan pada dashboard admin;
- Melakukan penyesuaian coding aplikasi dan melakukan backup rutin untuk aplikasi dan database ke folder backup.

Dalam pelaksanaan Gudang SRG dengan WMS terdapat beberapa kendala seperti :

- Proses bisnis, jenis komoditas Pengelola Gudang SRG beragam, sehingga masih perlu dilakukannya penyempurnaan fitur aplikasi WMS guna memberikan kemudahan bagi Pengelola Gudang dalam melakukan

pengelolaan barang.

- Pelatihan WMS belum dilakukan untuk seluruh Gudang SRG di daerah sehingga belum dapat diterapkan di seluruh daerah.

Tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun anggaran selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan implementasi WMS pada Gudang SRG adalah pengembangan aplikasi WMS sehingga dapat mengakomodir kebutuhan pelaku usaha perdagangan khususnya Pengelola Gudang SRG dan cakupan pemanfaatan WMS akan diperluas tidak hanya kepada pengelola gudang yang memanfaatkan SRG tetapi juga kepada pelaku usaha perdagangan secara luas dalam rangka meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemanfaatan Gudang baik SRG maupun non SRG dalam rangka ketahanan pangan dan ketersediaan stok komoditas.

IK-5 Indeks Kepuasan Layanan Perizinan SRG dan PLK

Perhitungan capaian indikator ini didapatkan dari survei yang dibagikan kepada user/pengguna layanan. Pengguna layanan yang dimaksud adalah Pengelola Gudang, Penyelenggaran PLK, dan Lembaga Penilaian Kesesuaian SRG. Pada tahun 2024 dilakukan 3 (tiga) kali kepuasan layanan perizinan SRG dan PLK. Kuesioner survei kepuasan layanan perizinan SRG dan PLK memuat pertanyaan mengenai aspek pelayanan yaitu persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta sarana dan prasarana

Tabel 2.9

Target dan Realisasi IK-5 Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Kepuasan Layanan Perizinan SRG dan PLK	85	91,91	108,13%



Gambar 3. 9 Hasil Survei Kepuasan layanan perizinan SRG



Gambar 3. 10 Hasil Survei Kepuasan layanan perizinan PLK

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil survei yang dilakukan selama tahun 2024 indeks kepuasan layanan SRG mendapatkan predikat (A) atau sangat baik. Survei yang dilakukan pada triwulan I menghasilkan indeks sebesar 97,06 dan survei yang dilakukan pada triwulan II menghasilkan indeks sebesar 90,58. Selanjutnya pada triwulan III indeks kepuasan pengguna layanan perizinan SRG sebesar 88,08. Secara tertimbang indeks kepuasan pengguna layanan perizinan SRG selama tahun 2024 adalah sebesar 91,91. Tabel berikut ini merangkum realisasi capaian IK 5 dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Tabel 2.10 Perbandingan Capaian IK 5

No.	Tahun	Target IK 5	Realisasi Capaian IK 5	Persentase capaian (%)
1.	2022	80	86,563	108,203
2.	2023	83	86,25	103,9
3.	2024	85	91,91	108,13

Jika dibandingkan dari tahun ke tahun terjadi peningkatan target indeks kepuasan layanan perizinan SRG dan PLK. Hal ini mencerminkan komitmen Bappebti untuk terus berupaya melakukan perbaikan kualitas layanan kepada pelaku usaha. Sebagai upaya untuk mencapai peningkatan kualitas layanan di bidang perizinan SRG dan PLK, Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK melaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung hal ini, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pemrosesan permohonan persetujuan lembaga SRG di daerah. Dengan adanya pemrosesan permohonan persetujuan di daerah diharapkan Lembaga SRG yang telah mendapatkan persetujuan dapat segera mengimplementasi SRG di daerah.

Pada periode Januari hingga Desember 2024, Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK telah melakukan 3 jenis pemrosesan perizinan yaitu pemrosesan perizinan Gudang SRG, Pengelola Gudang SRG, Lembaga Penilaian Kesesuaian. Adapun perizinan yang sudah disetujui adalah sebagai berikut :

A. 22 (dua puluh dua) Gudang SRG yaitu :

1. Gudang *Cold Storage* milik PT Satya Trinadi Komira Perkasa;
2. Gudang milik CV Fiona Benih Mandiri II;
3. Gudang Pemerintah Kabupaten Jombang;
4. Gudang *Cold Storage A* milik PT Sabindo Raya Gemilang;
5. Gudang *Cold Storage B* milik PT Sabindo Raya

Gemilang;

6. Gudang Pemerintah Kabupaten Kebumen;
7. Gudang milik CV Arofah Mina.
8. Gudang milik PT Pabrik Gula Ngadirejo (PTPN X)
9. Gudang UD Ratna Jaya;
10. Gudang UD Putra Gunung;
11. Gudang UD Surya Kencana;
12. Gudang UD Maju Bersama;
13. Gudang PT MAI (Suhartanto);
14. Gudang milik PT Kabepe Chakra;
15. Gudang *Cold Storage B* milik PT Siriman Jaya Abadi;
16. Gudang milik Warga Mandiri (PT Fiona Pusaka SRG, Fiqri Ahmad Wiranata);
17. Gudang Pemerintah Kabupaten Kuningan (Koperasi Tani bangkit Sejahtera);
18. Gudang UD Agong Antiq – Probolinggo;
19. Gudang CV Santoso Jaya Tembakau – Pasuruan;
20. Gudang CV Malaka Tembakau Indonesia – Situbondo;
21. Gudang 5 PT Samudera Indo Pangan;
22. Gudang Pemkab Banjarnegara (PT Pasti Jaya Sakti);

B. 6 (enam) Pengelola Gudang SRG yaitu:

1. PT Satya Trinadi Komira Perkasa;
2. PT Sabindo Raya Gemilang;
3. PT Mitra Desa Kebumen.
4. Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat (Persetujuan Perubahan Nama Pengelola Gudang SRG Perusahaan Daerah Tuah Sepakat Menjadi Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat)
5. Koperasi Tani Bangkit Sejahtera;
6. PT Pertanitas Panen Sedayu;

C. 3 (tiga) Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yaitu:

1. PT Usaha Berkah Kencana (Penambahan Ruang Lingkup Uji Mutu: Gabah, Beras, Jagung, Kopi)

2. PT Standar Sertifikasi Indonesia (LPK Sistem Manajemen Mutu);
3. PT TUV NORD Indonesia (LPK Manajemen Mutu)

2. Kegiatan pemeliharaan sistem persetujuan SRG dilakukan dengan tujuan agar sistem informasi tersebut dapat berjalan dengan optimal. Dengan adanya pemeliharaan tersebut diharapkan kendala yang dialami dalam pengoperasian sistem tersebut dapat diatasi. Selain itu dengan adanya pemeliharaan *database* dapat tersimpan secara aman dengan *backup* secara rutin. Kegiatan Pemeliharaan Sistem Persetujuan Lembaga SRG dilakukan dengan penunjukkan langsung pihak ketiga dalam hal ini yaitu PT Dhiatek Indo Jaya. Adapun waktu pelaksanaan yaitu dari bulan Februari hingga Desember 2024.

3. Pemrosesan Persetujuan Lembaga Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas merupakan bagian dalam rangkaian kegiatan pelayanan dan pemrosesan persetujuan di bidang Pasar Lelang Komoditas. Bentuk badan usaha yang disetujui untuk menjadi penyelenggara pasar lelang adalah Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD/Perumda), dan Koperasi. Secara spesifik, kegiatan ini dilakukan dengan metode observasi, verifikasi dan validasi serta penilaian atas dokumen, SDM, serta sarana dan prasarana terhadap lembaga (pelaku usaha) yang mengajukan permohonan persetujuan di bidang Pasar Lelang Komoditas.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IK-5 adalah belum banyak pengguna layanan perizinan yang mengisi kuesioner kepuasan layanan perizinan SRG dan PLK. Tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun selanjutnya adalah dengan memperpanjang waktu pengisian kuesioner.

IK-6 Hasil Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Produk Sistem Resi Gudang/Pasar Lelang yang Direkomendasikan

Indikator Kinerja ini merupakan indikator baru setelah adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan. Pada tahun 2024, Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK merealisasikan 5 (lima) Rekomendasi Kebijakan terkait komoditas Cengkeh, Cabai Kering, Penataan Ekosistem PLK, Pengawasan Berbasis Risiko dalam SRG dan Analisis Dampak Komoditi SRG Hasil Kajian Tahun 2023 (pinang, tapioka, mocaf, agar, kaagenan)

Tabel 2.11

Target dan Realisasi IK-6 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
Hasil Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Produk Sistem Resi Gudang/Pasar Lelang yang Direkomendasikan	4	5	125

Capaian tahun 2024 sebesar 125% dari target yang telah ditetapkan yaitu 4 Rekomendasi Kebijakan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan dimana pada tahun 2023 (sebesar 4 Rekomendasi). Target ini telah tercapai karena Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas telah merealisasikan 5 Rekomendasi Kebijakan terkait:

1. Kelayakan Cengkeh sebagai Komoditi yang dapat disimpan di Gudang Sistem Resi Gudang (SRG);
2. Kelayakan Olahan Cabai sebagai Komoditi yang dapat disimpan di Gudang Sistem Resi Gudang (SRG);
3. Penataan dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas;

4. Pengawasan Berbasis Risiko Dalam Sistem Resi Gudang.
5. Analisis Dampak Komoditi SRG Hasil Kajian Tahun 2023 (pinang, tapioka, mocaf, agar, kaagenan)

Target tercapai karena telah terlaksananya kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan pada Tahun 2024. Adapun kegiatan untuk mendukung keberhasilan IK-6, antara lain :

1. Pengumpulan data dan informasi desk research

Kegiatan pengumpulan data dan informasi desk research bertujuan untuk melakukan pengumpulan data dan analisis desk research untuk memperoleh data dan informasi pendukung analisis komoditas. Pada Tahun 2024, terkait kelayakan olahan cabai sebagai komoditi yang dapat disimpan di Gudang SRG, telah dilaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi di Provinsi Jawa Timur (Kota Surabaya, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Banyuwangi) pada tanggal 07-09 Oktober 2024 dan tanggal 16 – 18 Desember 2023. Selain itu dilakukan pengumpulan data ke pelaku industri olahan Cabai di Jabodetabek seperti PT Sasa Inti dan PT Gunacipta Multirasa.





Gambar 3. 11 Pelaksanaan Pengumpulan data dan Informasi Desk Research di Surabaya, Malang, Jabodetabek, dan Banyuwangi

Selanjutnya, telah dilaksanakan juga kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi *Desk Research* terkait pengawasan berbasis risiko dalam SRG di Probolinggo Jawa Timur pada 15-17 Juli 2024 dan Subang Jawa Barat pada 23-25 September 2024.

2. Pengumpulan data dan informasi analisis

Selama tahun 2024 kegiatan pengumpulan data dan informasi analisis terkait kelayakan cengkeh sebagai komoditi yang dapat disimpan di Gudang SRG telah dilaksanakan pengumpulan data dan informasi di Kabupaten Bulukumba dan Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan pada 9-11 Juli 2024 serta Kota Manado dan Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara yang dilakukan pada 16-18 Oktober 2024. Selain itu, telah dilakukan juga kegiatan pengumpulan data dan informasi analisis penataan dan pengembangan PLK di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau pada 11-13 Juni 2024 dan Solo dan Semarang Jawa Tengah pada 16-18 Juni 2024.

3. Identifikasi pengembangan kelembagaan dan komoditi

Pada tahun 2024 kegiatan identifikasi pengembangan kelembagaan dan komoditi telah dilaksanakan di Denpasar, Bali.

4. FGD Desk Research

Selama tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan FGD *Desk Research* dengan rincian:

- a. Kegiatan FGD Potensi Kelayakan Olahan Cabai sebagai Komoditi SRG telah dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2024 secara daring.
- b. Kegiatan FGD terkait Pengawasan Berbasis Risiko Dalam Sistem Resi Gudang dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2024 secara daring.

Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi/masukan tambahan dari para *stakeholder* dari hasil sementara yang telah disusun setelah survey lapangan, untuk dapat memperkaya hasil analisis sehingga dapat dirumuskan rekomendasi yang implementatif dan sesuai dengan yang diharapkan.



Gambar 3. 12 FGD Pengawasan Berbasis Risiko Dalam SRG

5. FGD analisis

Selama tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan FGD analisis dengan rincian:

- a. Pada tanggal 12 Agustus 2024 dilakukan FGD sebagai rangkaian kegiatan penyusunan Analisis Penataan dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas untuk memperoleh informasi/masukan tambahan dari para *stakeholder* dari hasil sementara yang telah disusun setelah survey lapangan untuk dapat memperkaya hasil analisis sehingga dapat

dirumuskan rekomendasi yang implementatif dan sesuai dengan yang diharapkan.

- b. Pada tanggal 12 September 2024 dilakukan kegiatan FGD Analisis Potensi Kelayakan Cengkeh sebagai Komoditi SRG. Kegiatan ini dalam rangka memperoleh masukan dan diskusi dari hasil yang telah disusun sehingga diperoleh masukan yang dapat dijadikan sebagai bahan finalisasi hasil analisis untuk kemudian disusun rekomendasi kelayakan pinang sebagai komoditi yang dapat disimpan dalam gudang SRG yang nantinya dapat diimplementasikan sesuai dengan yang kita harapkan bersama.



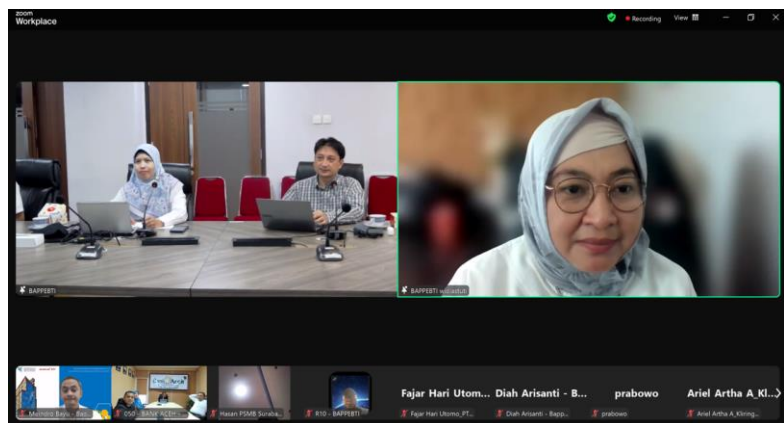
Gambar 3. 13 FGD Potensi Kelayakan Cengkeh sebagai Komoditi SRG

- c. Pada tanggal 13 September 2024 dilakukan kegiatan FGD Analisis Dampak Pinang, Karagenan dan Agar serta Tapioka dan Mocaf sebagai Komoditi SRG. Kegiatan ini dalam rangka menindaklanjuti hasil analisis komoditi SRG tahun 2023 untuk dapat diusulkan masuk ke dalam penetapan sebagai komoditi SRG melalui Permendag dengan menyusun analisis dampak biaya dan manfaat yang merupakan pendukung dalam usulan dimaksud. FGD dilaksanakan untuk memperoleh masukan dan diskusi dari hasil yang telah disusun sehingga diperoleh masukan yang dapat dijadikan sebagai bahan finalisasi untuk kemudian disusun rekomendasi penetapan penambahan sebagai komoditi yang dapat disimpan dalam gudang SRG beserta strategi penerapannya.

6. Konsinyering *Desk Research*

Selama tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan Konsinyering *Desk Research* dengan rincian :

- a. Pada tanggal 23 Desember 2024 dilakukan kegiatan Konsinyering Potensi Kelayakan Olahan Cabai sebagai Komoditi SRG. Kegiatan ini dalam rangka memperoleh masukan dan diskusi dari hasil yang telah disusun sehingga diperoleh masukan yang dapat dijadikan sebagai bahan finalisasi hasil *desk research* untuk kemudian disusun rekomendasi kelayakan Olahan Cabai sebagai komoditi yang dapat disimpan dalam gudang SRG yang nantinya dapat diimplementasikan sesuai dengan yang diharapkan bersama.
- b. Pada tanggal 14 Oktober 2024 dilakukan kegiatan Konsinyering Pengawasan Berbasis Risiko dalam Sistem Resi Gudang. Kegiatan ini dalam rangka untuk memperoleh informasi/masukan dari para *stakeholder* sebagai bahan finalisasi hasil analisis untuk kemudian disusun rekomendasi, sehingga nantinya dapat diimplementasikan dengan baik.



Gambar 3. 14 Konsinyering Pengawasan Berbasis Risiko Dalam SRG

7. Konsinyering Analisis

Selama tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan Konsinyering analisis dengan rincian:

- a. Pada tanggal 10 Oktober 2024 dilakukan Konsinyering Analisis Penataan dan Pengembangan Pasar Lelang

Komoditas dalam rangka melakukan pembahasan akhir dengan para *stakeholder*, sehingga rekomendasi Analisis Penataan dan Pengembangan PLK dapat difinalisasikan.

- b. Pada tanggal 31 Oktober 2024 dilakukan kegiatan Konsinyering Potensi Kelayakan Cengkeh sebagai Komoditi SRG. Kegiatan ini dalam rangka memperoleh masukan dan diskusi dari hasil yang telah disusun sehingga diperoleh masukan yang dapat dijadikan sebagai bahan finalisasi untuk kemudian disusun rekomendasi kelayakan Cengkeh sebagai komoditi yang dapat disimpan dalam gudang SRG.

8. Analisis PTT Pasar Lelang Komoditas

Kegiatan analisis PTT Pasar lelang Komoditas pada tahun 2024 telah dilaksanakan di Jakarta dalam rangka penyusunan Pedoman Teknis mengenai tata cara penyusunan PTT Penyelenggara PLK dan Lembaga Penjaminan PLK.

Kendala dalam mencapai IK-6 selama tahun 2024 yaitu terbatasnya akses kepada pelaku usaha komoditas yang akan dikaji sebagai komoditas SRG sehingga data komoditas dirasa masih sangat kurang. Tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya adalah mengembangkan informasi terkait pelaku usaha guna mendapatkan data komoditas yang lebih valid, sehingga *desk research* dan analisis dimaksud dapat selesai lebih cepat atau tepat waktu.

IK-7. Persentase Pelaku Usaha yang Menjadikan Layanan Informasi Harga sebagai Referensi Harga Komoditas SRG dan PLK

Kegiatan pendukung pada Indikator Kinerja ini terkait dengan informasi harga komoditas yang dapat di Resi Gudang-kan serta komoditas unggulan daerah lainnya yang umum ditransaksikan di Pasar Lelang Komoditas. Data komoditas yang tercatat sampai dengan saat ini adalah komoditas bawang merah, lada, gabah, beras, kelapa sawit, kakao, karet bokar, jagung dan tembakau. Daerah yang menjadi referensi harga komoditas SRG dan PLK antara lain Bangka Belitung, Brebes, Cianjur, Grobogan,

Tasikmalaya, Padang, Jambi, Palembang, Lampung, Kuantansingingi, Kendari dan Kabupaten Malang.

Tabel 2.12
Target dan Realisasi IK-7 Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Pelaku Usaha yang Menjadikan Layanan Informasi Harga sebagai Referensi Harga Komoditas SRG dan PLK	85	84,32	99,2%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat capaian IK-7 tahun 2024 sebesar 99,2%. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya terjadi perubahan indikator kinerja kegiatan, dimana pada tahun 2023 capaian sebesar 20 (target 20 daerah) berdasarkan tersedianya sumber informasi harga komoditas SRG dan PLK pada daerah dimana artinya capaian IK-7 tahun 2023 adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya secara umum terjadi penurunan sebesar 0,8%. Untuk tahun 2024 terjadi perubahan indikator kinerja kegiatan dari jumlah daerah yang memanfaatkan layanan informasi harga menjadi persentase pelaku usaha yang memanfaatkan layanan informasi harga.

Metode pengumpulan data informasi harga ini melalui *Short Message Service* (SMS) dari kontributor terkait dengan data harian komoditas. Data komoditas yang dikirimkan disimpan dan diolah oleh aplikasi Sistem Informasi Harga Komoditas (SIHK) yang dikembangkan oleh Bappebti yang dapat dijadikan sebagai salah satu referensi pembentukan harga harian komoditas pada level petani dan pedagang kecil sampai dengan menengah di sentra komoditas unggulan.

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan penunjang IK-7 adalah minimnya informasi terkait Sistem Informasi Harga Komoditi

sebagai salah satu referensi harga komoditas dibidang Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas. Tindak Lanjut yang akan dilakukan pada kegiatan selanjutnya yaitu melaksanakan literasi terkait pemanfaatan Sistem Informasi Harga Komoditi sebagai salah satu referensi harga harian komoditas di bidang Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas serta bekerja sama dengan pemerintah daerah terkait sebagai salah satu upaya diseminasi informasi mengenai pemanfaatan Sistem Informasi Harga Komoditas sebagai salah satu referensi harga komoditas

B. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2024

Capaian realisasi keuangan Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas adalah sebesar 99,85% dari total pagu anggaran revisi Tahun 2024.

Pada Tahun 2024 Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK memperoleh pagu awal sebesar Rp. 6.092.000.000,- yang kemudian mengalami beberapa kali revisi anggaran sehingga besaran pagu sebesar Rp.4.861.927.000,-. Realisasi Anggaran Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 4.854.497.692,- atau 99,85% dari pagu revisi. Adapun Alokasi Anggaran Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas secara rinci untuk mencapai 1 sasaran dengan 7 indikator kinerja utama beserta realisasinya untuk tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.11 Realisasi Anggaran Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator kinerja	Kegiatan	Realisasi s/d Des 2023		
				Pagu*	Realisasi	%
1	Meningkatnya hasil pembinaan dan pengembangan Sistem Resi Gudang. dan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengelola Gudang yang telah Menerbitkan Resi Gudang	a. Pembinaan Penyalur Skema Subsidi Resi Gudang	335.400.000	334.200.234	99,6
			a. Pembiayaan Skema Subsidi Resi Gudang yang dipantau	117.400.000	116.841.514	99,5
			b. Pengelola Gudang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SRG	220.240.000	220.227.026	99,9
			c. Calon Pengelola Gudang yang dilatih untuk menjadi pengelola Gudang SRG	68.920.000	66.892.115	97,1

No	Sasaran	Indikator kinerja	Kegiatan	Realisasi s/d Des 2023		
				Pagu*	Realisasi	%
			d. Sistem Informasi Persetujuan Lembaga SRG dalam Pemeliharaan	154.000.000	153.957.000	99,9
			e. Pertemuan Teknis di Daerah dengan Pemangku Kepentingan	502.690.000	502.454.808	99,9
		Jumlah Pengguna Pasar Lelang yang Berpartisipasi	a. Penyelenggara dan Pelaku Usaha PLK di Daerah yang Mengikuti Pertemuan Teknis	352.525.000	351.522.317	99,7
			b. Penyelenggara dan Pelaku Usaha yang Mengikuti Asistensi dan Evaluasi Penggunaan SPLT	316.410.000	315.755.463	99,8
			c. Sistem Pasar Lelang Terpadu yang handal	210.500.000	210.467.100	99,9
		Persentase Pemahaman Peserta Bimbingan Teknis SRG dan PLK	Pelaku Usaha dan Petani yang Mengikuti Bimbingan Teknis SRG dan PLK	457.602.000	457.577.264	99,63
		Jumlah Daerah yang telah Memanfaatkan Gudang SRG dengan Warehouse Management System (WMS)	Gudang SRG dengan Warehouse Management System (WMS) yang dikembangkan	878.676.000	878.277.496	99,9
		Indeks Kepuasan Layanan Perizinan SRG dan PLK	a. Lembaga SRG yang mendapatkan persetujuan	412.451.000	411.498.370	99,8
			b. Lembaga PLK yang mendapatkan persetujuan	7.842.000	7.826.750	99,8
		Hasil Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Produk Sistem Resi Gudang/Pasar Lelang yang Direkomendasikan	Analisa Pengembangan Kelembagaan dan Produk di Bidang SRG dan PLK	742.043.000	741.867.818	99,9
		Tersedianya Sumber Informasi Harga Komoditas SRG dan PLK	Layanan Data dan Informasi Harga Komoditi di Bidang SRG dan PLK	85.188.000	85.132.417	99,9
		TOTAL		4.861.927.000	4.854.497.692	99,85%

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2026

A. VISI dan MISI

Visi	Perdagangan yang Ekspansif dan Terintegrasi Dengan Rantai Pasar Domestik dan Global Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045
MISI	1. Meningkatkan kinerja perdagangan domestik yang terintegrasi dan berkelanjutan pada periode 2025-2029. 2. Meningkatkan kinerja ekspor barang dan jasa yang bernilai tambah dan berkelanjutan pada periode 2025-2029. 3. Memperkuat kapasitas kelembagaan urusan perdagangan yang efektif dan efisien pada periode 2025-2029.

B. Program, Kegiatan, Tujuan, dan Sasaran Kegiatan Bappebti dan Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas

SASARAN PROGRAM	Sebagai penjabaran visi dan misi Kementerian Perdagangan RI Bappebti TA 2026, maka diperlukan program kerja yang sinergi dengan unit-unit terkait lain yang ada di lingkungan Kementerian Perdagangan. Adapun Sasaran Program BAPPEBTI pada Tahun 2026 adalah Meningkatnya kinerja PBK, SRG, PLK yang tangguh dan berkelanjutan.
------------------------	---

SASARAN KEGIATAN	Untuk mencapai Program yang telah ditentukan tersebut Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas mempunyai Sasaran Kegiatan yaitu Meningkatnya pembinaan dan pengembangan SRG dan PLK.
-------------------------	--

TUJUAN	Tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2026 adalah : 1. Meningkatkan pemanfaatan Sistem Resi Gudang sebagai sarana tunda jual dan alternatif pembiayaan 2. Meningkatkan pemanfaatan Pasar Lelang untuk efisiensi rantai perdagangan
SASARAN	Sasaran yang ingin dicapai Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, pada tahun 2026 yaitu: “Meningkatnya pembinaan dan pengembangan SRG dan PLK “
Sasaran Kegiatan (output) Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas Tahun 2026 terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja kegiatan.	Agar kinerja Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas dapat tercapai secara maksimal untuk mencapai sasaran strategis, maka ditetapkan Rencana Kerja Tahun 2026 dengan beberapa indikator kinerja kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Pertumbuhan Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang 2. Pertumbuhan pelaku Pasar Lelang Komoditas 3. Persentase jumlah peserta bimtek di bidang Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang meningkat pemahamannya 4. Indeks kepuasan layanan perizinan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang Komoditas 5. Rekomendasi kebijakan pengembangan kelembagaan dan produk Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang ditindaklanjuti

Masing-masing Indikator Sasaran Kegiatan (output) terdiri dari komponen kegiatan pendukung Adapun dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja sesuai target yang telah ditetapkan, masing-masing Indikator Sasaran Kegiatan (output) terdiri dari komponen kegiatan pendukung dengan nilai pagu anggaran yang sudah ditetapkan.

Tabel 3.1

Target Capaian Kinerja Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas Tahun 2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1.	Pertumbuhan pengelola gudang Sistem Resi Gudang	5%
2.	Pertumbuhan pelaku Pasar Lelang Komoditas	5%
3.	Persentase jumlah bimtek di bidang Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	90%
4.	Indeks kepuasan layanan perizinan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang Komoditas	86 Nilai
5.	Rekomendasi kebijakan pengembangan kelembagaan dan produk Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang ditindaklanjuti	75%

Sumber : KRISNA Rencana Kerja Bappebti 2026

C. Indikator Kinerja Kegiatan dan Output Kegiatan

Indikator Kinerja

Kegiatan I:

Pertumbuhan

pengelola gudang

Sistem Resi Gudang

Target kinerja sasaran kegiatan ini adalah sebanyak 5%. Indikator Kinerja Kegiatan ini didukung oleh Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output sebagai berikut :

1. Klasifikasi Rincian Output Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (QDB), dengan Rincian Output meliputi:
 - a. Fasilitasi dan Pembinaan calon Pengelola Gudang SRG dengan komponen Pelaksanaan

Bimbingan Teknis Penyiapan Calon pengelola Gudang SR. (QDB.002)

Pengelola Gudang SRG sebagai aktor utama dalam suksesnya pelaksanaan Sistem Resi Gudang di daerah, diharapkan mampu menjadi penggerak roda bisnis SRG. Oleh karena itu, perlu disiapkan SDM pengelola gudang yang berkompeten, mandiri dan profesional serta mempunyai pengetahuan tentang SRG secara menyeluruh, tidak hanya teknis pengelolaan dan pemeliharaan barang dalam Gudang, tetapi juga hal-hal yang terkait dengan pengetahuan pengujian komoditas dalam SRG, pedoman operasional baku pengelola gudang SRG, pemanfaatan jasa asuransi sebagai proteksi, sistem manajemen mutu, sistem Informasi dan alur skema kerja yang terdapat dalam Sistem Informasi Resi Gudang (IS-WARE).

Selain faktor teknis tersebut, Pengelola Gudang juga harus memiliki integritas yang tinggi termasuk juga memiliki moral yang tinggi dalam menjalankan tanggung jawabnya. Selama komoditas disimpan di Gudang SRG, maka keberadaannya merupakan tanggung jawab Pengelola Gudang. Citra dan kepercayaan Pengelola Gudang harus dijaga dengan baik agar Sistem Resi Gudang mendapat kepercayaan dari lembaga pembiayaan maupun pelaku usaha lainnya. Oleh karena itu, untuk menjadi Pengelola Gudang SRG, Bappebti menerapkan standar tertentu dalam memberikan persetujuan sebagai Pengelola Gudang bagi lembaga/instansi, baik berupa kemampuan SDM yang harus dimiliki, dokumen-dokumen yang harus dilengkapi, juga persyaratan keuangan

yang harus dipenuhi.

Berdasarkan pada hal – hal tersebut diatas, Bappebti memandang perlu melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Calon Pengelola Gudang dalam Sistem Resi Gudang yang bertujuan untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) calon pengelola gudang SRG yang handal, mandiri dan profesional serta memenuhi kompetensi dalam pengelolaan gudang dan barang dalam pelaksanaan SRG. Agar pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan secara efektif dan peserta dapat memahami SRG secara komprehensif dan menyeluruh serta dapat mempelajari praktek pelaksanaan SRG secara langsung di lapangan, maka kegiatan ini akan dilaksanakan secara fisik/tatap muka. Diharapkan melalui kegiatan ini, dapat dihasilkan Pengelola Gudang SRG yang mampu memahami SRG secara komprehensif dan memiliki kemampuan untuk berinovasi dalam mengembangkan serta mengintegrasikan SRG dengan kegiatan bisnis lainnya, sehingga dapat berpengaruh positif bagi perkembangan SRG secara nasional.

Penerima manfaat dari kegiatan Bimbingan Teknis Calon Pengelola Gudang dalam Sistem Resi Gudang adalah badan usaha berbadan hukum sebagaimana ketentuan yang dimuat dalam Persaturan Kepala Bappebti Nomor 9 Tahun 2018 tentang Persetujuan Sebagai Pengelola Gudang SRG dan secara tidak langsung hal ini akan bermanfaat pula bagi para stakeholders SRG dan pelaku usaha di daerah ketika para peserta ini telah menjadi Pengelola Gudang SRG.

Metode pelaksanaan Bimbingan Teknis Calon

Pengelola Gudang SRG akan dilakukan dengan cara pemberian materi terkait SRG oleh para narasumber/pembicara, meliputi pengetahuan dasar tentang SRG, prosedur teknis dalam SRG, analisis usaha pergudangan, sistem informasi SRG dan kewirausahaan. Di dalam pelatihan juga akan dilakukan simulasi/praktek pelaksanaan SRG dan kunjungan lapangan di Gudang SRG. Melalui kunjungan lapangan, peserta diharapkan dapat melihat dan mempelajari secara langsung aktivitas Pengelola Gudang dalam menjalankan usaha jasa Gudang SRG.

- b. Pembinaan/pendampingan pengelola gudang SRG dalam mengimplementasikan Warehouse Management System (WMS) dengan komponen Pembinaan / pendampingan Operasionalisasi Sistem WMS (QDB.003)

WMS merupakan sebuah Aplikasi yang dibangun dengan tujuan untuk mengkomputerasi bisnis proses Pengelola Gudang SRG dan memudahkan penggunaanya dalam berkomunikasi, berkoordinasi, dan memantau operasionalisasi terkait keluar masuk barang yang terdapat dalam gudang SRG lebih jauh sistem ini juga mampu menghubungkan Pengelola Gudang dengan mitra usahanya antara lain *stakeholder* perusahaan, *existing buyer* dan *supplier*, calon *buyer* dan *supplier*, serta perusahaan jasa logistik. Namun demikian berdasarkan hasil evaluasi penggunaan sistem pada tahun 2020 ternyata ditemui beberapa kendala antara lain kurang familiarnya SDM di Pengelola Gudang SRG terhadap sistem ini. Untuk itu, pada tahun 2025 guna membantu SDM berproses dari operasionalisasi secara manual

menjadi digital masih diperlukan kegiatan pendampingan penggunaan sistem. Kegiatan ini dilakukan dengan menugaskan tenaga pendamping di gudang-gudang SRG yang telah dan akan dipasang Aplikasi WMS selama 1 bulan penuh. Tugas dan kewenangan dari tenaga pendamping ini adalah memperkenalkan dan membantu SDM pengelola Gudang melakukan tugas kesehariannya dengan memanfaatkan aplikasi ini. Tenaga pendamping ini sebelumnya telah dibekali pemahaman dan pengetahuan mengenai penggunaan sistem untuk setiap lini bisnis proses pengelola gudang SRG. Dalam melakukan tugasnya tenaga pendamping wajib berkoordinasi dan berkomunikasi intensif dengan BAPPEBTI dan Pengembangan Aplikasi WMS.

2. Klasifikasi Rincian Output Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria dengan Rincian Output Rancangan NSPK berupa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pengelola Gudang SRG, dengan komponen meliputi (AFA.001):

- a. Persiapan Penyusunan Rancangan NSPK Pengelola Gudang (AFA.051)

Salah satu upaya membangun SDM dalam negeri adalah dengan menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai acuan dalam pembinaan dan penyiapan SDM yang kompeten dan berdaya saing tinggi melalui pelatihan, uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi, sehingga dapat membangun terciptanya keseragaman kualitas - kompetensi suatu jabatan kerja serta diakui oleh seluruh pemangku kepentingan dan berlaku secara nasional di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkaitan dengan pengembangan Sistem Resi

Gudang (SRG), diatur mengenai Pengelola Gudang yang memiliki peran penting dalam menjaga integritas SRG dan bertugas untuk melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang. Tenaga kerja di bidang usaha ini perlu memiliki kompetensi dalam menjalankan pekerjaannya. Dengan adanya SKKNI diharapkan dapat menjadi acuan bagi Bappebti dalam memberikan persetujuan kelembagaan di bidang terkait serta dalam melakukan pengawasan, memberikan kepercayaan bagi pelaku usaha yang terlibat dalam bidang usaha terkait serta mendorong tumbuhnya usaha di bidang SRG yang akuntabel.

b. Penyusunan Rancangan NSPK Pengelola Gudang (AFA.052)

Salah satu upaya membangun SDM dalam negeri adalah dengan menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai acuan dalam pembinaan dan penyiapan SDM yang kompeten dan berdaya saing tinggi melalui pelatihan, uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi, sehingga dapat membangun terciptanya keseragaman kualitas - kompetensi suatu jabatan kerja serta diakui oleh seluruh pemangku kepentingan dan berlaku secara nasional di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkaitan dengan pengembangan Sistem Resi Gudang (SRG), diatur mengenai Pengelola Gudang yang memiliki peran penting dalam menjaga integritas SRG dan bertugas untuk melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang. Tenaga kerja di bidang usaha ini perlu memiliki kompetensi dalam menjalankan pekerjaannya. Dengan adanya

SKKNI diharapkan dapat menjadi acuan bagi Bappebti dalam memberikan persetujuan kelembagaan di bidang terkait serta dalam melakukan pengawasan, memberikan kepercayaan bagi pelaku usaha yang terlibat dalam bidang usaha terkait serta mendorong tumbuhnya usaha di bidang SRG yang akuntabel.

3. Klasifikasi Rincian Output Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, Rincian Output Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Penyalur Skema Subsidi Resi Gudang, dengan komponen meliputi (BDB.001) :

a. Pembinaan Penyalur Skema Subsidi Resi Gudang (BDB.051).

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187 Tahun 2021 tentang Skema Subsidi Resi Gudang dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang, berimplikasi kepada perubahan terkait pelaksanaan kebijakan Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG). Beberapa kebijakan yang berubah antara lain plafon pembiayaan, ruang lingkup penerima S-SRG, penambahan skema subsidi margin (Pembiayaan Syariah), jangka waktu pembiayaan, sinergi dengan KUR, serta pemindahan Kuasa Pengguna Anggaran dari Ditjen Perbendaharaan Negara ke Bappebti.

Menindaklanjuti perubahan tersebut, perlu dilaksanakan pembinaan dalam bentuk sosialisasi dan koordinasi secara intensif dengan para stakeholders terkait, sehingga implementasi kebijakan subsidi pembiayaan SRG dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, berjalan efektif dan efisien, dan mampu meningkatkan pemanfaatan

skema tersebut bagi para pelaku usaha.

b. Pemantauan Pelaksanaan Pembiayaan Skema Subsidi Resi Gudang (BDB.052)

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187 Tahun 2021 tentang Skema Subsidi Resi Gudang dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang, yang salah satunya adalah mengamanatkan Bappebti untuk melakukan moniring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran pembiayaan melalui S-SRG, maka Bappebti perlu melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran S-SRG sehingga implementasi di lapangan dapat berjalan tepat guna dan tepat sasaran serta sesuai dengan peraturan dan SOP yang berlaku. Dengan kegiatan ini, kinerja Penyaluran S-SRG diharapkan dapat berjalan dengan lancar, tertib dan teratur serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaannya. Selain itu, hasil dari monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai masukan dalam menyusun kebijakan terkait penyaluran SSRG dan implementasi SRG pada umumnya.

4. Klasifikasi Rincian Output Data dan Informasi Publik dengan rincian ouput Data dan Informasi Harga Komoditi di Bidang SRG dan PLK dengan komponen Penyediaan Layanan Informasi Harga Komoditi di Bidang SRG dan PLK (BMA.001)

Seiring berkembangnya teknologi informasi, semakin banyak media yang digunakan dalam mengakses berbagai macam sumber data dan informasi. Media elektronik/online menjadi yang sangat dominan dan efektif yang dipergunakan oleh masyarakat, baik itu melalui media televisi, perangkat smartphone, komputer atau perangkat elektronik lainnya. Dalam

pelaksanaan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, ketersediaan informasi harga komoditas yang up to date dan mudah diakses oleh para pelaku usaha merupakan faktor kunci yang dapat membantu para pelaku yang memanfaatkan SRG dan PLK sebagai media pemasaran komoditas. Oleh karena itu, guna mendukung dan membantu para petani dan UKM serta pelaku usaha lain, Bappebti membangun Sistem Informasi Harga Komoditas yang dapat diakses via website <http://infoharga.bappebti.go.id> serta masyarakat dapat melakukan permintaan informasi harga melalui mekanisme pengiriman pesan pendek melalui telepon (SMS) ke nomor yang sudah terdaftar dalam sistem informasi harga dengan format sms yang telah ditentukan. Komoditas yang masuk dalam layanan informasi harga antara lain yang masuk dalam skema sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas, seperti Gabah/Beras, Kopi, Rumput Laut, Karet Bokar, Jagung, dll. Adapun sumber informasi harga ini berasal dari kontributor harga di tingkat petani di beberapa daerah yang telah ditunjuk oleh Bappebti, yang pada umumnya merupakan daerah pelaksanaan SRG dan PLK.

Informasi Pasar yang transparan dan mudah diakses oleh seluruh lapisan dalam masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam perekonomian. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi dan pola penyebaran informasi yang bersifat aktif tentu saja akan memberikan manfaat yang besar bagi para pelaku usaha, khususnya wilayah rural. Informasi ini akan sangat penting bagi para pelaku usaha sebagai acuan dalam menyusun rencana usaha dan pemasarannya. Penyediaan sistem informasi harga yang nantinya dapat diakses dari manapun baik secara mandiri melalui website ataupun di gudang – gudang SRG dan Aplikasi Lelang online akan dapat menjadi

referensi bagi para petani dan pelaku usaha yang memanfaatkan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas.

Dalam mencapai target KRO Layanan Data dan Informasi Publik tahun 2025, Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK akan melakukan kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Informasi Harga Komoditas SRG/PLK. Kegiatan Pengelolaan Informasi Harga Komoditas adalah untuk menyediakan pelayanan informasi data komoditas dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan BAPPEBTI di bidang Sistem Resi Gudang dan pasar lelang komoditas.

5. Klasifikasi Rincian Output Koordinasi dengan rincian output Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan di bidang SRG dengan komponen Pertemuan Teknis SRG di Daerah dengan Pemangku Kepentingan (PEA.001)

Dalam rangka meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah baik di tingkat Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, Bappebti akan menginisiasi pertemuan koordinasi teknis di 10 daerah (provinsi) dengan melibatkan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Kelembagaan dalam SRG serta para Pelaku Usaha, Koperasi dan Petani/UKM yang dilakukan secara online maupun offline. Dalam pertemuan ini akan dibahas teknis penyiapan pelaksanaan dan pengembangan SRG serta diidentifikasi dukungan kebijakan dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Diharapkan melalui kegiatan ini akan terwujud sinergi antara pemangku kepentingan baik di tingkat provinsi, kabupaten serta lembaga terkait SRG.

6. Klasifikasi Rincian Output Sistem Informasi Pemerintahan dengan rincian output Sistem Aplikasi Warehouse Management System (WMS) dengan komponen Pemeliharaan Aplikasi Warehouse Management System (WMS) di Gudang SRG. (UAB.002)

Pelaksanaan SRG yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi memungkinkan pemerintah untuk melakukan **pemantauan ketersediaan dan sebaran stok komoditas** yang tercatat dalam Sistem Informasi Resi Gudang (IS-WARE) yang dibangun dan dikelola oleh PT Kliring Berjangka Indonesia selaku Pusat Registrasi SRG. Melalui sistem ini, Pemerintah dapat mengetahui ketersediaan dan sebaran komoditas di setiap wilayah lokasi gudang SRG dengan mudah dan *realtime* sehingga dapat menjadi instrumen pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait dengan ketersebaran dan ketersediaan komoditas di daerah-daerah, terutama komoditas pangan ataupun komoditas strategis yang berpengaruh besar pada tingkat inflasi. Namun demikian, tujuan pemantauan ketersediaan dan sebaran stok komoditas dapat terwujud apabila SRG telah dilaksanakan secara luas dengan jumlah dan sebaran gudang SRG aktif yang melingkupi seluruh kabupaten di Indonesia, atau setidaknya seluruh propinsi di Indonesia. Selain itu, temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa Gudang – Gudang SRG yang dibangun oleh Pemerintah selama ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyimpan komoditas, namun tanpa menggunakan skema SRG. Hal ini menyebabkan ketiadaan informasi terkait sejauh mana pemanfaatan Gudang tersebut.

Alternatif pengembangan IS-WARE agar dapat juga memantau ketersediaan dan sebaran stok komoditas pada gudang-gudang non-SRG, tidak dapat dilakukan,

karena : Pertama, IS-WARE adalah sistem informasi yang dimiliki oleh PT Kliring Berjangka Indonesia selaku Pusat Registrasi SRG. Peran Pusat Registrasi SRG hanya terbatas pada Gudang-Gudang yang masuk sebagai Gudang SRG, karena aplikasi ini hanya berfungsi mengelola transaksi yang berhubungan dengan Resi Gudang mulai dari penerbitan Resi Gudang sampai penyelesaian transaksi Resi Gudang, sedangkan bagaimana pengelolaan barang sejak masuk ke gudang, penumpukan dan pemeliharaan hingga keluar dan pengiriman barang berada di luar ruang lingkup aplikasi ini. Kedua, status kepemilikan IS-WARE yang dimiliki dan dikelola oleh satu badan usaha akan menyebabkan penggunaan aplikasi Warehouse Management System menjadi terbatas. Akan ada kecenderungan pengguna aplikasi untuk tidak menginput data dan informasi yang valid, karena hal tersebut akan sama dengan menyerahkan data dan informasi vital perusahaan ke rivalnya. Sehingga akan lebih baik apabila sistem informasi ini dikembangkan dan dikelola oleh pemerintah.

Oleh karena itu Bappebti telah membangun Sistem Informasi Manajemen Pergudangan / Warehouse Management System (WMS) yang mengintegrasikan seluruh gudang – gudang SRG yang dibangun pemerintah baik yang telah dimanfaatkan dalam skema SRG maupun belum. Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan kegiatan pengembangan aplikasi WMS dan pemeliharaan sistem. Pengembangan WMS meliputi penyesuaian model bisnis Pengelola Gudang baik yang telah terdaftar sebagai Pengelola Gudang SRG maupun yang belum memiliki persetujuan Pengelola Gudang SRG. Penyederhanaan proses bisnis yang fleksible dan modular merupakan fitur utama yang menjadi focus utama pengembangan WMS pada tahun ini. Untuk pemeliharaan WMS meliputi

pengarsipan data yang telah terkumpul dari aplikasi WMS, melakukan backup system secara rutin serta perawatan server dan Sistem Operasi Cloud yang menjadi system utama berjalannya aplikasi WMS.

Indikator Kinerja

Kegiatan II:

Pertumbuhan pelaku

Pasar Lelang

Komoditas

Target kinerja sasaran kegiatan ini adalah sebanyak 5%. Berikut aktivitas pendukung untuk mencapai indikator kinerja Jumlah Pengguna Pasar Lelang yang berpartisipasi yaitu meliputi :

1. Klasifikasi Rincian Output Sistem Informasi Pemerintahan dengan Rincian Ouput Sistem Aplikasi SPLT dengan komponen Pemeliharaan Sistem Pasar Lelang Terpadu. (UAB.001)

Pemeliharaan Sistem Pasar Lelang Terpadu bertujuan menjaga agar Sistem Informasi Pasar Lelang terpadu dapat berfungsi dengan baik dan optimal (hardware serta software) sehingga dapat diandalkan oleh pelaku usaha maupun Badan Pengawas. Kegiatan ini meliputi pemeliharaan sistem informasi PLK online dan sistem pelaporan PLK.

Pemeliharaan Sistem Pasar Lelang Terpadu dilaksanakan melalui penunjukkan langsung pihak ketiga, dengan ruang lingkup pekerjaan yang meliputi :

- a) Menjaga Sistem Pasar Lelang Terpadu dapat berjalan secara normal;
- b) Melakukan pemeliharaan dan pencadangan (backup) terhadap server sehingga dapat terus beroperasi optimal dan terjaga keamanannya;
- c) Memulihkan Sistem Pasar Lelang Terpadu apabila terjadi suatu masalah yang menyebabkan sistem tidak berfungsi;
- d) Melakukan penyempurnaan dan pengembangan

terhadap Sistem Pasar Lelang Terpadu.

2. Klasifikasi Rincian Output Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat dengan Rincian Output Pembinaan/ Pendampingan pada kegiatan Asistensi pelaku usaha PLK dengan komponen Pelaksanaan Asistensi dan Evaluasi PLK (QDC.003)

Kegiatan Asistensi dan Evaluasi Penggunaan SPLT pada tahun 2025 bertujuan untuk memberikan pendampingan penggunaan SPLT kepada Tenaga Operator SPLT di daerah dan pelaku usaha peserta lelang di daerah. Dengan terselenggaranya kegiatan ini diharapkan adanya feedback atau masukan dari pengguna SPLT guna perbaikan peningkatan pelayanan SPLT sehingga kepedaannya sistem tersebut dapat menjadi sistem perdagangan komoditas yang user friendly.

Indikator Kinerja Kegiatan III : Persentase Jumlah Bimtek di Bidang Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	Target kinerja sasaran kegiatan ini adalah sebesar 90%. Adapun aktivitas pendukung untuk mencapai indikator kinerja Persentase jumlah bimtek di bidang Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, meliputi : 1. Klasifikasi Rincian Output Fasilitas dan Pembinaan Lembaga dengan Rincian Output Fasilitas dan Pembinaan dalam rangka Peningkatan Kompetensi Pengelola Gudang SRG dengan komponen Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Lembaga SRG. (QDB.001) Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM Pengelola Gudang SRG sehingga dapat membentuk SDM yang unggul, profesional dan akuntabel di bidang SRG maka pada tahun 2024 akan dilakukan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Lembaga SRG. Kegiatan yang dilaksanakan tahun ini difokuskan pada peningkatan SDM Pengelola Gudang yang telah secara aktif dalam 1 sampai 2 tahun terakhir melakukan kegiatan ekspor komoditas dari Gudang SRG seperti di Aceh Tengah, Wonogiri, Makassar
--	--

dan Sidoarjo serta Pengelola Gudang yang berpotensi melakukan kegiatan ekspor seperti di Bali, Gowa, Bangka dan Banyuwangi. Melalui peningkatan kompetensi SDM Pengelola Gudang diharapkan Pengelola Gudang mampu memfasilitasi produsen (petani/pembudidaya) dalam menghasilkan produk yang berdaya saing dan memenuhi permintaan standar kualitas dari pasar internasional. Selain itu, diharapkan pengelola gudang mampu memahami tata kelola dan prosedur ekspor komoditas sehingga nantinya dapat menjadi pelaku utama dalam kegiatan ekspor komoditas dengan memanfaatkan SRG sebagai instrumen pendukung.

2. Klasifikasi Rincian Output Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dengan Rincian Output sebagai berikut:

- a. Pembinaan / Pendampingan pada pertemuan teknis pelaku usaha PLK dengan komponen Pelaksanaan Pertemuan Teknis PLK di daerah. (QDC.001)

Melalui kegiatan ini, selain dalam rangka memberikan informasi kebijakan Pasar Lelang Komoditas kepada aparat pemerintah di daerah dan *stakeholders* terkait, juga diharapkan menjadi sarana untuk mengidentifikasi kendala - kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah di dalam mengembangkan PLK di daerah serta memperoleh masukan – masukan yang bersifat teknis dari para peserta kegiatan baik dari kalangan aparat pemerintah daerah maupun dari kalangan pelaku usaha. Pertemuan Teknis diharapkan dapat menghasilkan rumusan kebijakan atau langkah – langkah strategis didalam pelaksanaan kebijakan pengembangan PLK di daerah.

Pada Tahun 2025, kegiatan ini direncanakan dilaksanakan di beberapa daerah penerima program dekonsentrasi PLK dan daerah baru yang potensial untuk pengembangan PLK.

- b. Fasilitasi dan Pembinaan pelaku usaha dan petani di bidang SRG dengan komponen Pelaksanaan Bimbingan Teknis SRG dan PLK Kepada Pelaku Usaha dan Petani. (QDC.002)

Dalam rangka meningkatkan pemahaman Masyarakat terkait SRG dan PLK maka pada Tahun 2025, Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK akan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis SRG dan PLK kepada Petani dan Pelaku Usaha. Kegiatan ini dilakukan dengan dua metode. Metode pertama dilakukan dengan cara penyuluhan massif di Gudang SRG dengan menghadirkan petani dan pelaku usaha yang berdomisili di sekitar Gudang SRG sebanyak 60 orang dengan pembicara dari Bappebti, pengelola Gudang, perbankan, dinas perindag dan SKPD terkait lainnya. Metode kedua materi mengenai keberadaan, manfaat dan mekanisme SRG dilakukan secara intensif dengan memanfaatkan tenaga penyuluh lapangan yang diberi materi dan perlengkapan (tas, kaos, dan media sosialisasi pendukung) untuk dibagikan kepada peserta penyuluhan. Tenaga penyuluh dalam satu daerah diberi target untuk dapat melakukan penyuluhan terhadap minimal 30 orang petani atau pelaku usaha yang sekiranya berpotensi untuk memanfaatkan SRG dan PLK dan menyampaikan laporan secara berkala kepada BAPPEBTI mengenai kegiatan penyuluhan tersebut dilengkapi dengan bukti pendukungnya.

3. Klasifikasi Rincian Output Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden [Program Baru Perubahan Kebijakan] dengan Rincian Output Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden dan komponen Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden. (FAN.ZZ1)

Merupakan kegiatan baru karena adanya kebijakan pemerintah yang nantinya anggaran ini dapat digunakan

menunggu arahan Presiden kepada Kementerian/Lembaga.

Indikator Kinerja Kegiatan IV:	Target kinerja sasaran kegiatan ini adalah 86. Adapun aktivitas pendukung untuk mencapai indikator kinerja Indeks kepuasan layanan perizinan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang Komoditas) termasuk dalam Klasifikasi Rincian Output yaitu :
Indeks kepuasan layanan perizinan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang Komoditas	1. Perizinan Lembaga dengan Rincian Output sebagai berikut : a. Perizinan Lembaga SRG dengan komponen Pemrosesan Operasional Permohonan Persetujuan Lembaga SRG (ACD.001)

Dalam hal pemberian persetujuan kelembagaan SRG dan PLK, terdapat prosedur yang wajib dijalankan oleh Bappebti sebelum akhirnya menerbitkan persetujuan lembaga SRG dan PLK. Sebagai gambaran, dalam memberikan persetujuan, Bappebti akan melakukan pemrosesan sesuai standar operasional prosedur yang antara lain meliputi pemeriksaan keabsahan, penilaian dokumen permohonan persetujuan, dan pemeriksaan fisik lembaga SRG/PLK serta uji kelayakan bagi pemohon (calon lembaga SRG/PLK). Dalam hal ini Bappebti akan mempertimbangkan persetujuan permohonan yang sesuai dengan persyaratan teknis sampai proses final penilaian dan kemudian memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi persyaratan secara teknis.

Diharapkan dengan kinerja pelayanan persetujuan yang prima dan sesuai dengan aturan yang berlaku dan SLA, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan persetujuan dari Bappebti semakin meningkat, serta akan terjadi peningkatan jumlah pelaku usaha di bidang SRG dan PLK yang mendapatkan persetujuan, sehingga pemanfaatan SRG dan PLK di daerah –

daerah terus berkembang dan semakin meluas.

- b. Perizinan Lembaga PLK dengan komponen Gudang SRG dengan Pemrosesan Persetujuan Lembaga Pasar Lelang Komoditas. (ACD.002)

Bappebti mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Komoditas. Bappebti melalui Tim Pemrosesan Persetujuan melakukan pemeriksaan keabsahan, penilaian dokumen permohonan persetujuan, dan pemeriksaan fisik serta uji kepatutan terhadap calon lembaga Pasar Lelang Komoditas sesuai dengan persyaratan. Dalam hal ini Bappebti akan mempertimbangkan persetujuan permohonan yang sesuai dengan persyaratan teknis sampai proses final penilaian dan kemudian memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi persyaratan secara teknis.

Diharapkan dengan kinerja pelayanan persetujuan yang prima dan sesuai dengan aturan yang berlaku, akan terjadi peningkatan jumlah pelaku usaha di dalam Pasar Lelang Komoditas yang mendapatkan persetujuan, sehingga pemanfaatan Pasar Lelang Komoditas terus berkembang dan semakin meluas.

- c. Sistem Informasi Pemerintahan dengan rincian output Sistem Informasi Persetujuan SRG dan PLK dan komponen Pemeliharaan Informasi Persetujuan Lembaga SRG dan PLK (FAB.001)

Dalam rangka menunjang pelayanan publik di bidang perijinan, saat ini telah tersedia Sistem Informasi Persetujuan SRG yang diharapkan dapat memudahkan pelaku usaha dalam pengajuan perijinan di Bidang SRG. Sistem ini akan terus dikembangkan dan disesuaikan

dengan kebutuhan, salah satunya menyesuaikan dengan prosedur perijinan sebagaimana di atur dalam Permendag Nomor 8 Tahun 2020 serta aturan terkait *Online Single Submission* (OSS).

Terkait dengan pemeliharaan Sistem Informasi Persetujuan SRG sebagai kegiatan penunjang Persetujuan Lembaga SRG, pelaksanaannya akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang memiliki latar belakang di bidang teknologi informasi. Tujuan dari pekerjaan pemeliharaan Sistem Informasi Lembaga SRG adalah :

- i. Sistem Persetujuan SRG dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.
- ii. Sistem dapat terus dihandalkan dan mampu disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam Sistem Resi Gudang.
- iii. Pemantauan data persetujuan dan kelembagaan dalam SRG.
- iv. Tersedianya pencadangan (*backup*) data transaksi lembaga dalam Sistem Resi Gudang.
- v. Pemulihan sistem dapat dilakukan segera apabila terjadi "*down*".

Tercapainya prinsip-prinsip transparansi dan terukur pada Proses Persetujuan Lembaga SRG yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

**Indikator Kinerja
Kegiatan V:
Rekomendasi
kebijakan
pengembangan
kelembagaan dan**

Pada tahun 2026, target kinerja Rekomendasi kebijakan pengembangan kelembagaan dan produk Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang ditindaklanjuti adalah sebesar 75%. Kegiatan pendukung yang akan dilakukan meliputi Klasifikasi Rincian Output Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan, dengan Rincian Output Rekomendasi Kebijakan terhadap Dampak Kebijakan

**produk Sistem Resi
Gudang dan Pasar
Lelang Komoditas
yang ditindaklanjuti**

Pengembangan Kelembagaan dan Komoditi SRG/PLK. (PBB.G02). Adapun komponen pendukungnya adalah :

1. Pengumpulan Data dan Informasi Analisis dampak Kelembagaan dan Produk SRG/PLK (PBB.G02.051).
2. Penyusunan Analisis Dampak Kelembagaan dan Produk SRG/PLK (PBB.G02.052)

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung indikator kinerja kegiatan ini pada tahun 2025 dimulai dengan melakukan pengumpulan data dan informasi baik data primer maupun data sekunder kepada stakeholder yang terkait untuk mendukung pelaksanaan penyusunan analisis kebijakan pengembangan kelembagaan dan komoditi SRG/PLK, yang meliputi regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan SRG dan PLK, data potensi komoditas/produk SRG/PLK di beberapa sentra produksinya (seperti: komoditas Kacang Hijau, Cengkeh, Pinang, atau lainnya), selain itu juga diperlukan data dan informasi ekosistem/kelembagaan SRG/PLK tersebut sehingga dapat dilihat atau dipetakan rancangan persiapan implementasi. Rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyusun atau melaksanakan Desk Research dan Analisis Pengembangan akan dilakukan FGD dan Konsinyering atau pembahasan untuk mendapatkan masukan yang lebih komprehensif dari pelaku usaha atas bahan kebijakan yang disusun, baik untuk analisis kelayakan produk/komoditas memiliki potensi untuk menjadi komoditas dalam SRG serta kajian terkait pengembangan ekosistem dan regulasi di bidang SRG dan PLK.

Untuk mendukung pengembangan kelembagaan PLK dilakukan analisis atas persetujuan Peraturan dan Tata Tertib (PTT) bagi penyelenggara Pasar Lelang Komoditas, baik untuk perubahan atas persetujuan (PTT) yang telah disetujui ataupun untuk PTT bagi penyelenggara PLK baru.

Hal lain yang dilakukan dalam rangka pengembangan kelembagaan dan komoditi SRG dan PLK, akan dilakukan kegiatan identifikasi pengembangan kelembagaan dan produk SRG dan PLK.

BAB IV**PENUTUP****Penutup**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari Rencana Kinerja Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan implementasi Sistem Resi Gudang maka pada tahun 2026 direncanakan kegiatan Pertemuan Teknis SRG sebagai sarana koordinasi antara Bappebti, Kementerian/Lembaga terkait di tingkat pusat, pemerintah daerah dan *stakeholders* terkait agar terjadi sinergi program dalam meningkatkan implementasi SRG. Selain itu juga melakukan Bimbingan Teknis SRG dan PLK kepada Pelaku Usaha dan Petani dan Penyiapan Calon Pengelola Gudang dalam SRG serta meningkatkan pelayanan dalam proses pemberian persetujuan bagi pelaku SRG;
2. Untuk meningkatkan kualitas Pasar Lelang Komoditas menuju pengelolaan manajemen Pasar Lelang yang lebih profesional dan mandiri akan dilaksanakan kegiatan Pertemuan Teknis Penyelenggara dengan Pelaku Usaha PLK di daerah dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pasar Lelang Terpadu;
3. Selain itu, akan dilakukan kajian – kajian strategis dalam rangka pengembangan kebijakan di bidang Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, baik dari aspek regulasi, produk, kelembagaan dan ekosistemnya, sehingga pelaksanaan kedua instrumen tersebut dapat terus berkembang menyesuaikan kebutuhan pelaku usaha.
4. Berbagai strategi dalam pengembangan dan perluasan SRG secara nasional terus dilakukan oleh Bappebti sehingga implementasi dan pemanfaatan SRG semakin merata, khususnya di daerah – daerah sentra produksi komoditas. Beberapa langkah yang telah dan akan terus dilakukan antara lain adalah mendorong pemanfaatan gudang SRG yang telah

dibangun oleh pemerintah (khususnya yang belum beroperasi), mendorong peran sektor swasta untuk berpartisipasi dalam implementasi SRG dan mengoptimalkan SRG sebagai instrumen dalam pengendalian stok dan harga komoditas pangan pokok. Selain itu, peningkatan Ekspor melalui instrumen SRG juga merupakan salah satu bagian dari langkah strategis Bappebti dalam upaya pengembangan Sistem Resi Gudang

5. Untuk itu, diperlukan suatu komitmen dari pimpinan Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas Bappebti beserta Pejabat Komitmen untuk menyamakan persepsi dan langkah bersama dalam mentaati jadwal kegiatan baik pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan secara berkala dan berkesinambungan sehingga program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2026 dapat tercapai.

LAMPIRAN 1A

FORMULIR

RENCANA KERJA

RONABANG SRG DAN PLK

TAHUN 2026

**FORMULIR RENCANA KERJA
BIRO PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SRG DAN PLK
TAHUN 2026**

SASARAN			
URAIAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET	SATUAN TARGET
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	Pertumbuhan Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang	5	Persen (%)
	Pertumbuhan Pelaku Pasar Lelang Komoditas	5	Persen (%)
	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Produk Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang Ditindaklanjuti	75	Persen (%)
	Indeks Kepuasan Layanan Perizinan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	86	Nilai
	Persentase Jumlah Peserta Bimtek di Bidang Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang Meningkatkan Pemahamannya	90	Persen (%)

Mengetahui, 23 Desember 2025

Plt. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK,



MATHEUS HENDRO PURNOMO

LAMPIRAN 2

FORMULIR APLIKASI KRISNA

BAPPENAS TAHUN 2026

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2. PROGRAM : EF - Program Perdagangan Dalam Negeri
3. SASARAN PROGRAM : 09 - Meningkatkan Kinerja Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas yang tangguh dan berkelanjutan
4. KEGIATAN : 3760 - Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang Komoditas
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 03 - Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas		525.000,0
01.01	Pertumbuhan Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang	5	
01.02	Pertumbuhan pelaku Pasar Lelang Komoditas	5	
01.03	Persentase jumlah peserta Bimtek di bidang Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang meningkat pemahamannya	90	
01.04	Indeks kepuasan layanan perizinan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	86	
01.05	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan kelembagaan dan produk Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang ditindaklanjuti	75	
Total			525.000,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas										525.000,0
01.ACD	Perizinan Lembaga										55.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.ACD.001	Perizinan Lembaga SRG								000 - Bukan Tematik		50.000,0
	051 - Pemrosesan Operasional Permohonan Persetujuan Lembaga SRG										50.000,0
		Pusat	Pusat								50.000,0
01.ACD.002	Perizinan Lembaga PLK								000 - Bukan Tematik		5.000,0
	051 - Pemrosesan Persetujuan Lembaga Pasar Lelang Komoditas										5.000,0
		Pusat	Pusat								5.000,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										50.000,0
01.AFA.001	Rancangan NSPK berupa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pengelola Gudang SRG								000 - Bukan Tematik		50.000,0
	051 - Persiapan Penyusunan Rancangan NSPK Pengelola Gudang										10.000,0
		Pusat	Pusat								10.000,0
	052 - Penyusunan Rancangan NSPK Pengelola Gudang										40.000,0
		Pusat	Pusat								40.000,0
01.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga										67.000,0
01.BDB.001	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Penyalur Skema Subsidi Resi Gudang								000 - Bukan Tematik		67.000,0
	051 - Pembinaan Penyalur Skema Subsidi Resi Gudang										42.000,0
		Pusat	Pusat								42.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Pemantauan Pelaksanaan Pembiayaan Skema Subsidi Resi Gudang										25.000,0
		Pusat	Pusat								25.000,0
01.BDB.002	Pembinaan/pendampingan dalam rangka pembentukan daerah baru yang mengimplementasikan PLK								000 - Bukan Tematik		0,0
01.BMA	Data dan Informasi Publik										5.000,0
01.BMA.001	Data dan Informasi Harga Komoditi di Bidang SRG dan PLK								000 - Bukan Tematik		5.000,0
	051 - Penyediaan Layanan Informasi Harga Komoditi di Bidang SRG dan PLK										5.000,0
		Pusat	Pusat								5.000,0
01.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan										30.000,0
01.FAB.001	Sistem Informasi Persetujuan SRG dan PLK								000 - Bukan Tematik		30.000,0
	051 - Pemeliharaan Informasi Persetujuan Lembaga SRG dan PLK										30.000,0
		Pusat	Pusat								30.000,0
01.PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan										45.000,0
01.PBB.001	Rekomendasi Kebijakan pengembangan kelembagaan dan produk di bidang SRG/PLK				Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global	Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Perdagangan untuk Peningkatan Perdagangan Antardaerah	000 - Bukan Tematik		0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Pengumpulan Data dan Informasi Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Komoditi SRG dan PLK										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Komoditi SRG dan PLK										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	053 - Evaluasi Pelaksanaan Kelembagaan dan Komoditi SRG dan PLK										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
01.PBB.002	Rekomendasi Kebijakan terhadap Dampak Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Komoditi SRG/PLK				Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global	Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Perdagangan untuk Peningkatan Perdagangan Antardaerah	000 - Bukan Tematik		45.000,0
	051 - Pengumpulan Data dan Informasi Analisis dampak Kelembagaan dan Produk SRG/PLK										35.000,0
		Pusat	Pusat								35.000,0
	052 - Penyusunan Analisis Dampak Kelembagaan dan Produk SRG/PLK										10.000,0
		Pusat	Pusat								10.000,0
01.PEA	Koordinasi										35.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.PEA.001	Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan di bidang SRG				Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global	Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Perdagangan untuk Peningkatan Perdagangan Antardaerah	000 - Bukan Tematik		35.000,0
	051 - Pertemuan Teknis SRG di Daerah dengan Pemangku Kepentingan										35.000,0
		Pusat	Pusat								35.000,0
01.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga										48.000,0
01.QDB.001	Fasiltasi dan Pembinaan dalam rangka Peningkatan Kompetensi Pengelola Gudang SRG				Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global	Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Perdagangan untuk Peningkatan Perdagangan Antardaerah	000 - Bukan Tematik		18.000,0
	051 - Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Lembaga SRG										18.000,0
		Pusat	Pusat								18.000,0
01.QDB.002	Fasiltasi dan pembinaan calon pengelola Gudang SRG				Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global	Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Perdagangan untuk Peningkatan Perdagangan Antardaerah	000 - Bukan Tematik		10.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyiapan Calon pengelola Gudang SRG										10.000,0
		Pusat	Pusat								10.000,0
01.QDB.003	Pembinaan/pendampingan pengelola gudang SRG dalam mengimplementasikan Warehouse Management System (WMS)				Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global	Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Perdagangan untuk Peningkatan Perdagangan Antardaerah	000 - Bukan Tematik		20.000,0
	051 - Pembinaan/pendampingan Operasionalisasi Sistem WMS										20.000,0
		Pusat	Pusat								20.000,0
01.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat										130.000,0
01.QDC.001	Pembinaan / Pendampingan pada pertemuan teknis pelaku usaha PLK				Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global	Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Perdagangan untuk Peningkatan Perdagangan Antardaerah	000 - Bukan Tematik		40.000,0
	051 - Pelaksanaan Pertemuan Teknis PLK di daerah										40.000,0
		Pusat	Pusat								40.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.QDC.002	Fasilitasi dan Pembinaan pelaku usaha dan petani di bidang SRG				Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global	Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Perdagangan untuk Peningkatan Perdagangan Antardaerah	000 - Bukan Tematik		55.000,0
	051 - Pelaksanaan Bimbingan Teknis SRG dan PLK Kepada Pelaku Usaha dan Petani										55.000,0
		Pusat	Pusat								55.000,0
01.QDC.003	Pembinaan / Pendampingan pada kegiatan Asistensi pelaku usaha PLK				Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global	Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Perdagangan untuk Peningkatan Perdagangan Antardaerah	000 - Bukan Tematik		35.000,0
	051 - Pelaksanaan Asistensi dan Evaluasi PLK										35.000,0
		Pusat	Pusat								35.000,0
01.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan										60.000,0
01.UAB.001	Sistem Aplikasi SPLT (Sistem Pasar Ielang Terpadu)				Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global	Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Perdagangan untuk Peningkatan Perdagangan Antardaerah	000 - Bukan Tematik		30.000,0
	051 - Pemeliharaan Sistem Pasar Lelang Terpadu (SPLT)										30.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								30.000,0
01.UAB.002	Sistem Aplikasi Warehouse Management System (WMS)				Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global	Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Perdagangan untuk Peningkatan Perdagangan Antardaerah	000 - Bukan Tematik		30.000,0
	051 - Pemeliharaan Aplikasi Warehouse Management System (WMS) di Gudang SRG										30.000,0
		Pusat	Pusat								30.000,0
Total											525.000,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas				525.000,0				0,0	0,0	0,0
01.ACD	Perizinan Lembaga		Institusi/ Badan Usaha/ Lembaga		55.000,0				0,0	0,0	0,0
01.ACD.001	Perizinan Lembaga SRG	2	Lembaga		50.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.ACD.001.051	Pemrosesan Operasional Permohonan Persetujuan Lembaga SRG	2,0	lembaga	25.000,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ACD.002	Perizinan Lembaga PLK	1	Lembaga		5.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.ACD.002.051	Pemrosesan Persetujuan Lembaga Pasar Lelang Komoditas	1,0	Lembaga	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		NSPK		50.000,0				0,0	0,0	0,0
01.AFA.001	Rancangan NSPK berupa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pengelola Gudang SRG	1	NSPK		50.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01.AFA.001.051	Persiapan Penyusunan Rancangan NSPK Pengelola Gudang	1,0	Laporan	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.001.052	Penyusunan Rancangan NSPK Pengelola Gudang	1,0	Dokumen	40.000,0	40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		Lembaga		67.000,0				0,0	0,0	0,0
01.BDB.001	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Penyalur Skema Subsidi Resi Gudang	2	Lembaga		67.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.BDB.001.051	Pembinaan Penyalur Skema Subsidi Resi Gudang	1,0	Laporan	42.000,0	42.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BDB.001.052	Pemantauan Pelaksanaan Pembiayaan Skema Subsidi Resi Gudang	1,0	Laporan	25.000,0	25.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BDB.002	Pembinaan/pendampingan dalam rangka pembentukan daerah baru yang mengimplementasikan PLK	0	Lembaga		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.BMA	Data dan Informasi Publik		dokumen/ Peta/ Data		5.000,0				0,0	0,0	0,0
01.BMA.001	Data dan Informasi Harga Komoditi di Bidang SRG dan PLK	1	dokumen		5.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.BMA.001.051	Penyediaan Layanan Informasi Harga Komoditi di Bidang SRG dan PLK	1,0	Dokumen	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan		Sistem Informasi		30.000,0				0,0	0,0	0,0
01.FAB.001	Sistem Informasi Persetujuan SRG dan PLK	1	Sistem Informasi		30.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.FAB.001.051	Pemeliharaan Informasi Persetujuan Lembaga SRG dan PLK	1,0	Sistem Informasi	30.000,0	30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		Rekomendasi Kebijakan		45.000,0				0,0	0,0	0,0
01.PBB.001	Rekomendasi Kebijakan pengembangan kelembagaan dan produk di bidang SRG/PLK	0	Rekomendasi Kebijakan		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.PBB.001.051	Pengumpulan Data dan Informasi Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Komoditi SRG dan PLK	0,0	Laporan	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.PBB.001.052	Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Komoditi SRG dan PLK	0,0	Dokumen Kajian	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.PBB.001.053	Evaluasi Pelaksanaan Kelembagaan dan Komoditi SRG dan PLK	0,0	Laporan	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.PBB.002	Rekomendasi Kebijakan terhadap Dampak Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Komoditi SRG/PLK	1	Rekomendasi Kebijakan		45.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.PBB.002.051	Pengumpulan Data dan Informasi Analisis dampak Kelembagaan dan Produk SRG/PLK	1,0	Laporan	35.000,0	35.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01.PBB.002.052	Penyusunan Analisis Dampak Kelembagaan dan Produk SRG/PLK	1,0	Rekomendasi Kebijakan	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.PEA	Koordinasi		kegiatan		35.000,0				0,0	0,0	0,0
01.PEA.001	Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan di bidang SRG	1	kegiatan		35.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.PEA.001.051	Pertemuan Teknis SRG di Daerah dengan Pemangku Kepentingan	1,0	Kegiatan	35.000,0	35.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		Lembaga		48.000,0				0,0	0,0	0,0
01.QDB.001	Fasiltasi dan Pembinaan dalam rangka Peningkatan Kompetensi Pengelola Gudang SRG	1	Lembaga		18.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.QDB.001.051	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Lembaga SRG	1,0	Kegiatan	18.000,0	18.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.QDB.002	Fasiltasi dan pembinaan calon pengelola Gudang SRG	1	Lembaga		10.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.QDB.002.051	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyiapan Calon pengelola Gudang SRG	1,0	Kegiatan	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.QDB.003	Pembinaan/pendampingan pengelola gudang SRG dalam mengimplementasikan Warehouse Management System (WMS)	1	Lembaga		20.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.QDB.003.051	Pembinaan/pendampingan Operasionalisasi Sistem WMS	1,0	Lembaga	20.000,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		Orang		130.000,0				0,0	0,0	0,0
01.QDC.001	Pembinaan / Pendampingan pada pertemuan teknis pelaku usaha PLK	15	Orang		40.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.QDC.001.051	Pelaksanaan Pertemuan Teknis PLK di daerah	1,0	Kegiatan	40.000,0	40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.QDC.002	Fasilitasi dan Pembinaan pelaku usaha dan petani di bidang SRG	75	Orang		55.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.QDC.002.051	Pelaksanaan Bimbingan Teknis SRG dan PLK Kepada Pelaku Usaha dan Petani	1,0	Kegiatan	55.000,0	55.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.QDC.003	Pembinaan / Pendampingan pada kegiatan Asistensi pelaku usaha PLK	15	Orang		35.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.QDC.003.051	Pelaksanaan Asistensi dan Evaluasi PLK	1,0	Kegiatan	35.000,0	35.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan		Sistem Informasi		60.000,0				0,0	0,0	0,0
01.UAB.001	Sistem Aplikasi SPLT (Sistem Pasar lelang Terpadu)	1	Sistem Informasi		30.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.UAB.001.051	Pemeliharaan Sistem Pasar Lelang Terpadu (SPLT)	1,0	Sistem Aplikasi	30.000,0	30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01.UAB.002	Sistem Aplikasi Warehouse Management System (WMS)	1	Sistem Informasi		30.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.UAB.002.051	Pemeliharaan Aplikasi Warehouse Management System (WMS) di Gudang SRG	1,0	Sistem Aplikasi	30.000,0	30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total					525.000,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										TOTAL
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	
01	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas		525.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525.000,0
01.ACD	Perizinan Lembaga		55.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55.000,0
01.ACD.001	Perizinan Lembaga SRG		50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
01.ACD.001.051	Pemrosesan Operasional Permohonan Persetujuan Lembaga SRG	Utama	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
01.ACD.002	Perizinan Lembaga PLK		5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0
01.ACD.002.051	Pemrosesan Persetujuan Lembaga Pasar Lelang Komoditas	Utama	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
01.AFA.001	Rancangan NSPK berupa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pengelola Gudang SRG		50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
01.AFA.001.051	Persiapan Penyusunan Rancangan NSPK Pengelola Gudang	Utama	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0
01.AFA.001.052	Penyusunan Rancangan NSPK Pengelola Gudang	Utama	40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40.000,0
01.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		67.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67.000,0
01.BDB.001	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Penyalur Skema Subsidi Resi Gudang		67.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67.000,0
01.BDB.001.051	Pembinaan Penyalur Skema Subsidi Resi Gudang	Utama	42.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42.000,0
01.BDB.001.052	Pemantauan Pelaksanaan Pembiayaan Skema Subsidi Resi Gudang	Utama	25.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.000,0
01.BDB.002	Pembinaan/pendampingan dalam rangka pembentukan daerah baru yang mengimplementasikan PLK		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BDB.002.051	Pendampingan Pelaku Usaha dalam rangka pembentukan Daerah Baru yang mengimplementasikan PLK	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BMA	Data dan Informasi Publik		5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.BMA.001	Data dan Informasi Harga Komoditi di Bidang SRG dan PLK		5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0
01.BMA.001.051	Penyediaan Layanan Informasi Harga Komoditi di Bidang SRG dan PLK	Utama	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0
01.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan		30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.000,0
01.FAB.001	Sistem Informasi Persetujuan SRG dan PLK		30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.000,0
01.FAB.001.051	Pemeliharaan Informasi Persetujuan Lembaga SRG dan PLK	Utama	30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.000,0
01.PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		45.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45.000,0
01.PBB.001	Rekomendasi Kebijakan pengembangan kelembagaan dan produk di bidang SRG/PLK		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.PBB.001.051	Pengumpulan Data dan Informasi Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Komoditi SRG dan PLK	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.PBB.001.052	Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Komoditi SRG dan PLK	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.PBB.001.053	Evaluasi Pelaksanaan Kelembagaan dan Komoditi SRG dan PLK	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.PBB.002	Rekomendasi Kebijakan terhadap Dampak Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Komoditi SRG/PLK		45.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45.000,0
01.PBB.002.051	Pengumpulan Data dan Informasi Analisis dampak Kelembagaan dan Produk SRG/PLK	Utama	35.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35.000,0
01.PBB.002.052	Penyusunan Analisis Dampak Kelembagaan dan Produk SRG/PLK	Utama	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0
01.PEA	Koordinasi		35.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35.000,0
01.PEA.001	Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan di bidang SRG		35.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35.000,0
01.PEA.001.051	Pertemuan Teknis SRG di Daerah dengan Pemangku Kepentingan	Utama	35.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35.000,0
01.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		48.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48.000,0
01.QDB.001	Fasiltasi dan Pembinaan dalam rangka Peningkatan Kompetensi Pengelola Gudang SRG		18.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.000,0
01.QDB.001.051	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Lembaga SRG	Utama	18.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.000,0
01.QDB.002	Fasiltasi dan pembinaan calon pengelola Gudang SRG		10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0
01.QDB.002.051	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyiapan Calon pengelola Gudang SRG	Utama	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0
01.QDB.003	Pembinaan/pendampingan pengelola gudang SRG dalam mengimplementasikan Warehouse Management System (WMS)		20.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0
01.QDB.003.051	Pembinaan/pendampingan Operasionalisasi Sistem WMS	Utama	20.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0
01.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		130.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.QDC.001	Pembinaan / Pendampingan pada pertemuan teknis pelaku usaha PLK		40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40.000,0
01.QDC.001.051	Pelaksanaan Pertemuan Teknis PLK di daerah	Utama	40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40.000,0
01.QDC.002	Fasilitasi dan Pembinaan pelaku usaha dan petani di bidang SRG		55.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55.000,0
01.QDC.002.051	Pelaksanaan Bimbingan Teknis SRG dan PLK Kepada Pelaku Usaha dan Petani	Utama	55.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55.000,0
01.QDC.003	Pembinaan / Pendampingan pada kegiatan Asistensi pelaku usaha PLK		35.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35.000,0
01.QDC.003.051	Pelaksanaan Asistensi dan Evaluasi PLK	Utama	35.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35.000,0
01.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan		60.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60.000,0
01.UAB.001	Sistem Aplikasi SPLT (Sistem Pasar Ielang Terpadu)		30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.000,0
01.UAB.001.051	Pemeliharaan Sistem Pasar Ielang Terpadu (SPLT)	Utama	30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.000,0
01.UAB.002	Sistem Aplikasi Warehouse Management System (WMS)		30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.000,0
01.UAB.002.051	Pemeliharaan Aplikasi Warehouse Management System (WMS) di Gudang SRG	Utama	30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.000,0
Total			525.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525.000,0

Jakarta, 23 Desember 2025

Pt. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK,



MATHEUS HENDRO PURNOMO

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2. PROGRAM : EF - Program Perdagangan Dalam Negeri
3. SASARAN PROGRAM : 09 - Meningkatkan Kinerja Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas yang tangguh dan berkelanjutan
4. KEGIATAN : 3760 - Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang Komoditas
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 03 - Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas		525.000,0
01.01	Pertumbuhan Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang	5	
01.02	Pertumbuhan pelaku Pasar Lelang Komoditas	5	
01.03	Persentase jumlah peserta Bimtek di bidang Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang meningkat pemahamannya	90	
01.04	Indeks kepuasan layanan perizinan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	86	
01.05	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan kelembagaan dan produk Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang ditindaklanjuti	75	
Total			525.000,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas										525.000,0
01.ACD	Perizinan Lembaga										55.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.ACD.001	Perizinan Lembaga SRG								000 - Bukan Tematik		50.000,0
	051 - Pemrosesan Operasional Permohonan Persetujuan Lembaga SRG										50.000,0
		Pusat	Pusat								50.000,0
01.ACD.002	Perizinan Lembaga PLK								000 - Bukan Tematik		5.000,0
	051 - Pemrosesan Persetujuan Lembaga Pasar Lelang Komoditas										5.000,0
		Pusat	Pusat								5.000,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										50.000,0
01.AFA.001	Rancangan NSPK berupa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pengelola Gudang SRG								000 - Bukan Tematik		50.000,0
	051 - Persiapan Penyusunan Rancangan NSPK Pengelola Gudang										10.000,0
		Pusat	Pusat								10.000,0
	052 - Penyusunan Rancangan NSPK Pengelola Gudang										40.000,0
		Pusat	Pusat								40.000,0
01.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga										67.000,0
01.BDB.001	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Penyalur Skema Subsidi Resi Gudang								000 - Bukan Tematik		67.000,0
	051 - Pembinaan Penyalur Skema Subsidi Resi Gudang										42.000,0
		Pusat	Pusat								42.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Pemantauan Pelaksanaan Pembiayaan Skema Subsidi Resi Gudang										25.000,0
		Pusat	Pusat								25.000,0
01.BDB.002	Pembinaan/pendampingan dalam rangka pembentukan daerah baru yang mengimplementasikan PLK								000 - Bukan Tematik		0,0
01.BMA	Data dan Informasi Publik										5.000,0
01.BMA.001	Data dan Informasi Harga Komoditi di Bidang SRG dan PLK								000 - Bukan Tematik		5.000,0
	051 - Penyediaan Layanan Informasi Harga Komoditi di Bidang SRG dan PLK										5.000,0
		Pusat	Pusat								5.000,0
01.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan										30.000,0
01.FAB.001	Sistem Informasi Persetujuan SRG dan PLK								000 - Bukan Tematik		30.000,0
	051 - Pemeliharaan Informasi Persetujuan Lembaga SRG dan PLK										30.000,0
		Pusat	Pusat								30.000,0
01.PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan										45.000,0
01.PBB.001	Rekomendasi Kebijakan pengembangan kelembagaan dan produk di bidang SRG/PLK				Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global	Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Perdagangan untuk Peningkatan Perdagangan Antardaerah	000 - Bukan Tematik		0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Pengumpulan Data dan Informasi Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Komoditi SRG dan PLK										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Komoditi SRG dan PLK										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	053 - Evaluasi Pelaksanaan Kelembagaan dan Komoditi SRG dan PLK										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
01.PBB.002	Rekomendasi Kebijakan terhadap Dampak Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Komoditi SRG/PLK				Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global	Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Perdagangan untuk Peningkatan Perdagangan Antardaerah	000 - Bukan Tematik		45.000,0
	051 - Pengumpulan Data dan Informasi Analisis dampak Kelembagaan dan Produk SRG/PLK										35.000,0
		Pusat	Pusat								35.000,0
	052 - Penyusunan Analisis Dampak Kelembagaan dan Produk SRG/PLK										10.000,0
		Pusat	Pusat								10.000,0
01.PEA	Koordinasi										35.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.PEA.001	Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan di bidang SRG				Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global	Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Perdagangan untuk Peningkatan Perdagangan Antardaerah	000 - Bukan Tematik		35.000,0
	051 - Pertemuan Teknis SRG di Daerah dengan Pemangku Kepentingan										35.000,0
		Pusat	Pusat								35.000,0
01.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga										48.000,0
01.QDB.001	Fasiltasi dan Pembinaan dalam rangka Peningkatan Kompetensi Pengelola Gudang SRG				Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global	Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Perdagangan untuk Peningkatan Perdagangan Antardaerah	000 - Bukan Tematik		18.000,0
	051 - Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Lembaga SRG										18.000,0
		Pusat	Pusat								18.000,0
01.QDB.002	Fasiltasi dan pembinaan calon pengelola Gudang SRG				Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global	Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Perdagangan untuk Peningkatan Perdagangan Antardaerah	000 - Bukan Tematik		10.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyiapan Calon pengelola Gudang SRG										10.000,0
		Pusat	Pusat								10.000,0
01.QDB.003	Pembinaan/pendampingan pengelola gudang SRG dalam mengimplementasikan Warehouse Management System (WMS)				Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global	Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Perdagangan untuk Peningkatan Perdagangan Antardaerah	000 - Bukan Tematik		20.000,0
	051 - Pembinaan/pendampingan Operasionalisasi Sistem WMS										20.000,0
		Pusat	Pusat								20.000,0
01.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat										130.000,0
01.QDC.001	Pembinaan / Pendampingan pada pertemuan teknis pelaku usaha PLK				Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global	Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Perdagangan untuk Peningkatan Perdagangan Antardaerah	000 - Bukan Tematik		40.000,0
	051 - Pelaksanaan Pertemuan Teknis PLK di daerah										40.000,0
		Pusat	Pusat								40.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.QDC.002	Fasilitasi dan Pembinaan pelaku usaha dan petani di bidang SRG				Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global	Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Perdagangan untuk Peningkatan Perdagangan Antardaerah	000 - Bukan Tematik		55.000,0
	051 - Pelaksanaan Bimbingan Teknis SRG dan PLK Kepada Pelaku Usaha dan Petani										55.000,0
		Pusat	Pusat								55.000,0
01.QDC.003	Pembinaan / Pendampingan pada kegiatan Asistensi pelaku usaha PLK				Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global	Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Perdagangan untuk Peningkatan Perdagangan Antardaerah	000 - Bukan Tematik		35.000,0
	051 - Pelaksanaan Asistensi dan Evaluasi PLK										35.000,0
		Pusat	Pusat								35.000,0
01.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan										60.000,0
01.UAB.001	Sistem Aplikasi SPLT (Sistem Pasar Ielang Terpadu)				Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global	Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Perdagangan untuk Peningkatan Perdagangan Antardaerah	000 - Bukan Tematik		30.000,0
	051 - Pemeliharaan Sistem Pasar Lelang Terpadu (SPLT)										30.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								30.000,0
01.UAB.002	Sistem Aplikasi Warehouse Management System (WMS)				Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global	Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Perdagangan untuk Peningkatan Perdagangan Antardaerah	000 - Bukan Tematik		30.000,0
	051 - Pemeliharaan Aplikasi Warehouse Management System (WMS) di Gudang SRG										30.000,0
		Pusat	Pusat								30.000,0
Total											525.000,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas				525.000,0				0,0	0,0	0,0
01.ACD	Perizinan Lembaga		Institusi/ Badan Usaha/ Lembaga		55.000,0				0,0	0,0	0,0
01.ACD.001	Perizinan Lembaga SRG	2	Lembaga		50.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.ACD.001.051	Pemrosesan Operasional Permohonan Persetujuan Lembaga SRG	2,0	lembaga	25.000,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ACD.002	Perizinan Lembaga PLK	1	Lembaga		5.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.ACD.002.051	Pemrosesan Persetujuan Lembaga Pasar Lelang Komoditas	1,0	Lembaga	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		NSPK		50.000,0				0,0	0,0	0,0
01.AFA.001	Rancangan NSPK berupa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pengelola Gudang SRG	1	NSPK		50.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01.AFA.001.051	Persiapan Penyusunan Rancangan NSPK Pengelola Gudang	1,0	Laporan	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.001.052	Penyusunan Rancangan NSPK Pengelola Gudang	1,0	Dokumen	40.000,0	40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		Lembaga		67.000,0				0,0	0,0	0,0
01.BDB.001	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Penyalur Skema Subsidi Resi Gudang	2	Lembaga		67.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.BDB.001.051	Pembinaan Penyalur Skema Subsidi Resi Gudang	1,0	Laporan	42.000,0	42.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BDB.001.052	Pemantauan Pelaksanaan Pembiayaan Skema Subsidi Resi Gudang	1,0	Laporan	25.000,0	25.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BDB.002	Pembinaan/pendampingan dalam rangka pembentukan daerah baru yang mengimplementasikan PLK	0	Lembaga		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.BMA	Data dan Informasi Publik		dokumen/ Peta/ Data		5.000,0				0,0	0,0	0,0
01.BMA.001	Data dan Informasi Harga Komoditi di Bidang SRG dan PLK	1	dokumen		5.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.BMA.001.051	Penyediaan Layanan Informasi Harga Komoditi di Bidang SRG dan PLK	1,0	Dokumen	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan		Sistem Informasi		30.000,0				0,0	0,0	0,0
01.FAB.001	Sistem Informasi Persetujuan SRG dan PLK	1	Sistem Informasi		30.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.FAB.001.051	Pemeliharaan Informasi Persetujuan Lembaga SRG dan PLK	1,0	Sistem Informasi	30.000,0	30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		Rekomendasi Kebijakan		45.000,0				0,0	0,0	0,0
01.PBB.001	Rekomendasi Kebijakan pengembangan kelembagaan dan produk di bidang SRG/PLK	0	Rekomendasi Kebijakan		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.PBB.001.051	Pengumpulan Data dan Informasi Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Komoditi SRG dan PLK	0,0	Laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.PBB.001.052	Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Komoditi SRG dan PLK	0,0	Dokumen Kajian	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.PBB.001.053	Evaluasi Pelaksanaan Kelembagaan dan Komoditi SRG dan PLK	0,0	Laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.PBB.002	Rekomendasi Kebijakan terhadap Dampak Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Komoditi SRG/PLK	1	Rekomendasi Kebijakan		45.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.PBB.002.051	Pengumpulan Data dan Informasi Analisis dampak Kelembagaan dan Produk SRG/PLK	1,0	Laporan	35.000,0	35.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01.PBB.002.052	Penyusunan Analisis Dampak Kelembagaan dan Produk SRG/PLK	1,0	Rekomendasi Kebijakan	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.PEA	Koordinasi		kegiatan		35.000,0				0,0	0,0	0,0
01.PEA.001	Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan di bidang SRG	1	kegiatan		35.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.PEA.001.051	Pertemuan Teknis SRG di Daerah dengan Pemangku Kepentingan	1,0	Kegiatan	35.000,0	35.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		Lembaga		48.000,0				0,0	0,0	0,0
01.QDB.001	Fasiltasi dan Pembinaan dalam rangka Peningkatan Kompetensi Pengelola Gudang SRG	1	Lembaga		18.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.QDB.001.051	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Lembaga SRG	1,0	Kegiatan	18.000,0	18.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.QDB.002	Fasiltasi dan pembinaan calon pengelola Gudang SRG	1	Lembaga		10.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.QDB.002.051	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyiapan Calon pengelola Gudang SRG	1,0	Kegiatan	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.QDB.003	Pembinaan/pendampingan pengelola gudang SRG dalam mengimplementasikan Warehouse Management System (WMS)	1	Lembaga		20.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.QDB.003.051	Pembinaan/pendampingan Operasionalisasi Sistem WMS	1,0	Lembaga	20.000,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		Orang		130.000,0				0,0	0,0	0,0
01.QDC.001	Pembinaan / Pendampingan pada pertemuan teknis pelaku usaha PLK	15	Orang		40.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.QDC.001.051	Pelaksanaan Pertemuan Teknis PLK di daerah	1,0	Kegiatan	40.000,0	40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.QDC.002	Fasilitasi dan Pembinaan pelaku usaha dan petani di bidang SRG	75	Orang		55.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.QDC.002.051	Pelaksanaan Bimbingan Teknis SRG dan PLK Kepada Pelaku Usaha dan Petani	1,0	Kegiatan	55.000,0	55.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.QDC.003	Pembinaan / Pendampingan pada kegiatan Asistensi pelaku usaha PLK	15	Orang		35.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.QDC.003.051	Pelaksanaan Asistensi dan Evaluasi PLK	1,0	Kegiatan	35.000,0	35.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan		Sistem Informasi		60.000,0				0,0	0,0	0,0
01.UAB.001	Sistem Aplikasi SPLT (Sistem Pasar lelang Terpadu)	1	Sistem Informasi		30.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.UAB.001.051	Pemeliharaan Sistem Pasar Lelang Terpadu (SPLT)	1,0	Sistem Aplikasi	30.000,0	30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01.UAB.002	Sistem Aplikasi Warehouse Management System (WMS)	1	Sistem Informasi		30.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.UAB.002.051	Pemeliharaan Aplikasi Warehouse Management System (WMS) di Gudang SRG	1,0	Sistem Aplikasi	30.000,0	30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total					525.000,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										TOTAL
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	
01	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas		525.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525.000,0
01.ACD	Perizinan Lembaga		55.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55.000,0
01.ACD.001	Perizinan Lembaga SRG		50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
01.ACD.001.051	Pemrosesan Operasional Permohonan Persetujuan Lembaga SRG	Utama	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
01.ACD.002	Perizinan Lembaga PLK		5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0
01.ACD.002.051	Pemrosesan Persetujuan Lembaga Pasar Lelang Komoditas	Utama	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
01.AFA.001	Rancangan NSPK berupa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pengelola Gudang SRG		50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
01.AFA.001.051	Persiapan Penyusunan Rancangan NSPK Pengelola Gudang	Utama	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0
01.AFA.001.052	Penyusunan Rancangan NSPK Pengelola Gudang	Utama	40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40.000,0
01.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		67.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67.000,0
01.BDB.001	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Penyalur Skema Subsidi Resi Gudang		67.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67.000,0
01.BDB.001.051	Pembinaan Penyalur Skema Subsidi Resi Gudang	Utama	42.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42.000,0
01.BDB.001.052	Pemantauan Pelaksanaan Pembiayaan Skema Subsidi Resi Gudang	Utama	25.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.000,0
01.BDB.002	Pembinaan/pendampingan dalam rangka pembentukan daerah baru yang mengimplementasikan PLK		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BDB.002.051	Pendampingan Pelaku Usaha dalam rangka pembentukan Daerah Baru yang mengimplementasikan PLK	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BMA	Data dan Informasi Publik		5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.BMA.001	Data dan Informasi Harga Komoditi di Bidang SRG dan PLK		5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0
01.BMA.001.051	Penyediaan Layanan Informasi Harga Komoditi di Bidang SRG dan PLK	Utama	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0
01.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan		30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.000,0
01.FAB.001	Sistem Informasi Persetujuan SRG dan PLK		30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.000,0
01.FAB.001.051	Pemeliharaan Informasi Persetujuan Lembaga SRG dan PLK	Utama	30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.000,0
01.PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		45.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45.000,0
01.PBB.001	Rekomendasi Kebijakan pengembangan kelembagaan dan produk di bidang SRG/PLK		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.PBB.001.051	Pengumpulan Data dan Informasi Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Komoditi SRG dan PLK	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.PBB.001.052	Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Komoditi SRG dan PLK	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.PBB.001.053	Evaluasi Pelaksanaan Kelembagaan dan Komoditi SRG dan PLK	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.PBB.002	Rekomendasi Kebijakan terhadap Dampak Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Komoditi SRG/PLK		45.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45.000,0
01.PBB.002.051	Pengumpulan Data dan Informasi Analisis dampak Kelembagaan dan Produk SRG/PLK	Utama	35.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35.000,0
01.PBB.002.052	Penyusunan Analisis Dampak Kelembagaan dan Produk SRG/PLK	Utama	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0
01.PEA	Koordinasi		35.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35.000,0
01.PEA.001	Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan di bidang SRG		35.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35.000,0
01.PEA.001.051	Pertemuan Teknis SRG di Daerah dengan Pemangku Kepentingan	Utama	35.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35.000,0
01.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		48.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48.000,0
01.QDB.001	Fasiltasi dan Pembinaan dalam rangka Peningkatan Kompetensi Pengelola Gudang SRG		18.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.000,0
01.QDB.001.051	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Lembaga SRG	Utama	18.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.000,0
01.QDB.002	Fasiltasi dan pembinaan calon pengelola Gudang SRG		10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0
01.QDB.002.051	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyiapan Calon pengelola Gudang SRG	Utama	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0
01.QDB.003	Pembinaan/pendampingan pengelola gudang SRG dalam mengimplementasikan Warehouse Management System (WMS)		20.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0
01.QDB.003.051	Pembinaan/pendampingan Operasionalisasi Sistem WMS	Utama	20.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0
01.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		130.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.QDC.001	Pembinaan / Pendampingan pada pertemuan teknis pelaku usaha PLK		40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40.000,0
01.QDC.001.051	Pelaksanaan Pertemuan Teknis PLK di daerah	Utama	40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40.000,0
01.QDC.002	Fasilitasi dan Pembinaan pelaku usaha dan petani di bidang SRG		55.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55.000,0
01.QDC.002.051	Pelaksanaan Bimbingan Teknis SRG dan PLK Kepada Pelaku Usaha dan Petani	Utama	55.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55.000,0
01.QDC.003	Pembinaan / Pendampingan pada kegiatan Asistensi pelaku usaha PLK		35.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35.000,0
01.QDC.003.051	Pelaksanaan Asistensi dan Evaluasi PLK	Utama	35.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35.000,0
01.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan		60.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60.000,0
01.UAB.001	Sistem Aplikasi SPLT (Sistem Pasar Ielang Terpadu)		30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.000,0
01.UAB.001.051	Pemeliharaan Sistem Pasar Ielang Terpadu (SPLT)	Utama	30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.000,0
01.UAB.002	Sistem Aplikasi Warehouse Management System (WMS)		30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.000,0
01.UAB.002.051	Pemeliharaan Aplikasi Warehouse Management System (WMS) di Gudang SRG	Utama	30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.000,0
Total			525.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525.000,0

Jakarta, 23 Desember 2025

Plt. Kepala Biro Pembinaan dan
Pengembangan SRG dan PLK,



MATHEUS HENDRO PURNOMO